

KINERJA B P O M

Dalam Angka Triwulan III

2023



• • • •

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2023

• • • •

Kata Sambutan



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan RidhoNya sehingga BPOM dapat terus hadir melayani dan melindungi masyarakat melalui jaminan Obat dan Makanan yang aman, berkualitas/bermanfaat, dan bermutu. Kinerja BPOM sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 dituangkan dalam "Kinerja BPOM Dalam Angka". Buku ini merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah dan juga sumber informasi tentang hasil - hasil pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam buku ini disampaikan hasil pengawasan Obat dan Makanan baik yang dilakukan BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan yang mencakup standardisasi, evaluasi *pre-market*, hingga pengawasan *post-market* yang disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023, beberapa kinerja yang telah dicapai BPOM di antaranya adalah persetujuan 136.389 NIE, pemeriksaan terhadap 23.987 sarana produksi dan sarana distribusi, pengujian 58.496 sampel, 207 perkara, dan 375 kegiatan pelaksanaan KIE.

Tahun 2023 diharapkan menjadi momentum pemulihan ekonomi mengingat pandemi Covid-19 sudah mulai melandai. Untuk mendukung hal tersebut, BPOM semakin intensif dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM supaya produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasaran. Terima kasih kepada seluruh jajaran BPOM serta mitra kerja atas kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III Tahun 2023. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua mitra kerja BPOM sebagai bahan evaluasi bagi pelaksana kegiatan agar terus berupaya bersama meningkatkan kinerja pada masa mendatang dalam upaya melayani dan melindungi masyarakat.

Jakarta, 22 November 2023
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,



Dr. Dra. L. Rizka Andalucia, M.Pharm., Apt.

Daftar Isi

SAMBUTAN BPOM RI	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
HIGHLIGHT	1
 I. Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan	9
II. Penindakan di Bidang Obat dan Makanan	17
III. Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman	23
IV. Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	27
V. Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan	29
VI. Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat	31
VII. Digitalisasi Pelayanan Publik	39
VIII. Penguatan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Obat dan Makanan	45
IX. Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	51
X. Kerjasama Internasional	57
XI. Sumber Daya Manusia	61
XII. Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan I 2023	63
XIII. Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM	65
 PENUTUP	65
LAMPIRAN	67

Daftar Gambar

Gambar 1.	Profil Registrasi Obat dan Makanan	9
Gambar 2.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan	9
Gambar 3.	Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan	10
Gambar 4.	Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan	10
Gambar 5.	Profil Sertifikasi Obat dan Makanan	13
Gambar 6.	Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan	13
Gambar 7.	Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan	14
Gambar 8.	Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan	17
Gambar 9.	Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan III	18
Gambar 10.	Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan s.d Triwulan III 2023	19
Gambar 11.	Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d Triwulan III 2023	20
Gambar 12.	Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi s.d. Triwulan III 2023	31
Gambar 13.	Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan III 2023	32
Gambar 14.	Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan Platform s.d. Triwulan III 2023	33
Gambar 15.	Top engagement content terkait Badan POM pada platform Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan II 2023	34
Gambar 16.	Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan III 2023	34
Gambar 17.	Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media s.d. Triwulan III 2023	35
Gambar 18.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2023	36
Gambar 19.	Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi	37
Gambar 20.	Aktivitas pada BPOM Mobile Periode 2018 – 30 September 2023	40
Gambar 21.	Statistik Pemanfaatan SIPT s.d. Triwulan III Tahun 2023	41
Gambar 22.	Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan III 2023	48
Gambar 23.	Proses dan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Badana POM Tahun 2023	52
Gambar 24.	Realisasi Anggaran s.d Triwulan III 2023	63

Daftar Tabel

Tabel 1.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Targeted)	11
Tabel 2.	Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (Random)	12
Tabel 3.	Profil Laporan Efek Samping	14



Kinerja Bpom Dalam Angka Triwulan III Tahun 2023 | Highlight

Highlight

Perkuat Laboratorium Hadapi Tantangan Pengawasan Global



Yogyakarta - Kamis - Jumat, 13 -14 Juli 2023. BPOM menggelar *Workshop Grand Design* Penguatan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan serta *Launching* Konsep Baru Regionalisasi Laboratorium. Kegiatan yang berlangsung dua hari ini bertujuan untuk memperkuat laboratorium BPOM dalam menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan di masa depan. Dalam sambutannya, Kepala BPOM mengatakan perlunya antisipasi untuk merespons tantangan global pengawasan jaminan mutu serta keamanan obat dan makanan yang semakin kompleks dalam 20 tahun ke depan. Laboratorium BPOM harus memiliki kapasitas terdepan untuk menghasilkan uji yang valid atas parameter keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan. "Hasil pengujian obat dan makanan tidak hanya penting untuk perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga bagi praktik berusaha yang adil dan taat aturan," ucap Kepala BPOM lagi.

BPOM Gelar Forum Menuju *Environmentally Sustainable Corporate Governance* di Industri Obat dan Makanan



Jakarta - Senin, 17 Juli 2023. Sebagai bentuk dukungan produksi dan konsumsi obat dan makanan berkelanjutan, BPOM menggelar forum "Menuju Environmentally Sustainable Corporate Governance di Industri Obat dan Makanan". Tema yang diangkat adalah BPOM Mendukung Produksi dan Konsumsi Obat dan Makanan Berkelanjutan untuk Indonesia Maju dalam rangka *World Environment Day* (WED). Kegiatan ini merupakan acara puncak dalam rangkaian *World Environment Day* (WED). Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menjelaskan industri bersama BPOM menjadi garda terdepan untuk melindungi bumi di sektor obat dan makanan sesuai dengan *Sustainable Development Goals* 2030 (SDGs) ke-12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Hal tersebut menjadi salah satu strategi menuju pencapaian visi Indonesia Emas 2045 dengan salah satu pilarnya adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berkomitmen terhadap lingkungan hidup dan pembangunan rendah karbon.

Cegah Kanker Serviks, BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin NusaGARD Produksi Biofarma



Jakarta - Rabu, 2 Agustus 2023. BPOM telah menerbitkan izin edar Vaksin NusaGard produksi PT Bio Farma atas kerja sama transfer teknologi dari *Merck Sharp Dohme* (MSD). Hasil evaluasi BPOM menunjukkan Vaksin NusaGard terbukti mampu mencegah kanker serviks pada perempuan usia 9-45 tahun dan lesi genital eksternal pada laki-laki usia 9-26 tahun. Vaksin ini akan digunakan dalam program Imunisasi *Human Papilloma Virus* (HPV) nasional mulai Agustus 2023. Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menyampaikan apresiasi hadirnya Vaksin NusaGard sebagai kontribusi penting industri farmasi nasional. Ketersediaan akses vaksin HPV yang aman dan bermutu sangat penting. "Kami lakukan pengawalan penjaminan mutu fasilitas produksi dan registrasi Vaksin NusaGard yang memiliki efikasi 95-100% dengan masa proteksi bertahan 10-12 tahun," ujar Kepala BPOM saat menghadiri Launching Vaksin NusaGard.

Berdayakan Pramuka Jadi Kader Pengawasan Obat dan Makanan



Jakarta - Kepala BPOM RI, Penny K Lukito, memberikan motivasi kepemimpinan kepada sekitar 15.000 anggota Pramuka dalam ajang Jumpa Tokoh Raimuna Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2023 di Lapangan Buperti Cibubur. Kepala BPOM mengajak ribuan kader Pramuka untuk berperan penting dalam melindungi masyarakat dengan konsumsi obat dan makanan yang aman. Anggota Pramuka yang tergabung dalam Saka POM didorong untuk dapat memanfaatkan aplikasi Pramuka Sapa yang telah disiapkan untuk menunjang berjalannya fungsi pengawasan obat dan makanan. Melalui aplikasi tersebut, anggota Saka POM dapat melaporkan temuan pangan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) di peredaran, seperti pangan tanpa izin edar (TIE), kedaluwarsa, atau rusak.

Tingkatkan Kapasitas Pengawasan Melalui Risk Management Plan



Jakarta, Sabtu 19 September 2023. Workshop Perkuatan Kapasitas BPOM dalam Pengawasan Pre-Market melalui Evaluasi *Risk Management Plan* (RMP) atau Perencanaan Manajemen Risiko (PMR) diselenggarakan untuk membantu industri farmasi dalam penyusunan dokumen RMP sebagai bagian dari dokumen registrasi, serta memperkuat kapasitas BPOM dan industri farmasi dalam penerapan RMP, termasuk *environmental risk assessment* (ERA) di tahap registrasi obat sekaligus memperkuat pengetahuan dan kapasitas evaluator BPOM dalam evaluasi dokumen RMP. Workshop diikuti oleh lebih dari 350 peserta yang terdiri pegawai BPOM, industri farmasi, dan peserta lain yang hadir secara luring dan daring. Sementara itu, narasumber yang hadir antara lain *Founder and Chairman of Indonesia Water Institute*, ahli dari *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia, Perwakilan dari Merck US, Direktur Registrasi Obat BPOM dan Direktur Pengawasan Keamanan Mutu Ekspor Impor Obat dan NPPZA BPOM.

BPOM Ajak Beauty Enthusiast Cerdaskan Masyarakat dan Gunakan Kosmetik Aman



Jakarta, Rabu 21 September 2023. BPOM menyelenggarakan "Forum Peningkatan Literasi Kosmetik Aman" bagi para *beauty enthusiast* di Jakarta, dalam rangka memberikan edukasi kepada 100 orang *beauty enthusiast* karena mereka dapat memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih dan membeli kosmetik. Kegiatan ini juga dihadiri oleh kementerian/lembaga terkait, beberapa asosiasi, dan komunitas. Untuk meningkatkan literasi *beauty enthusiast*, pada kegiatan ini, Kepala BPOM *me-launching* program INSPIRASI-Kosmetik Aman (Intensifikasi Peningkatan Literasi *Beauty Enthusiast*). Program ini dimaksudkan untuk pemberdayaan komunitas *beauty enthusiast* yang lebih efektif dan akan menjadi program berkelanjutan dengan sinergisme bersama stakeholder.





Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2023 | BAB I

BAB I

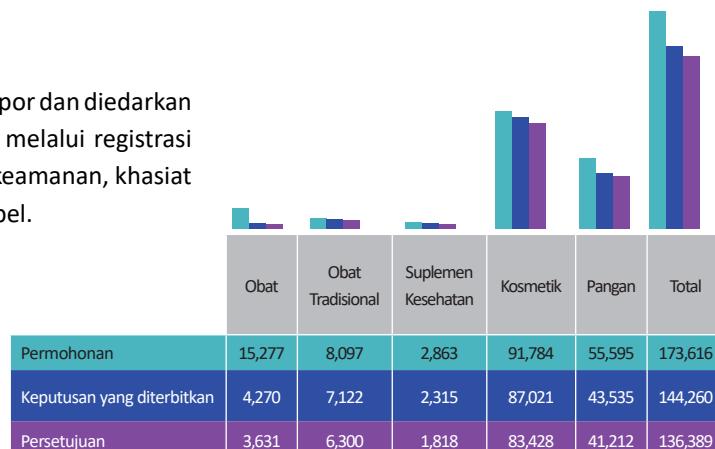
Hasil Pengawasan Keamanan, Khasiat, dan Mutu Produk Obat dan Makanan

Pengawasan *Pre-market*

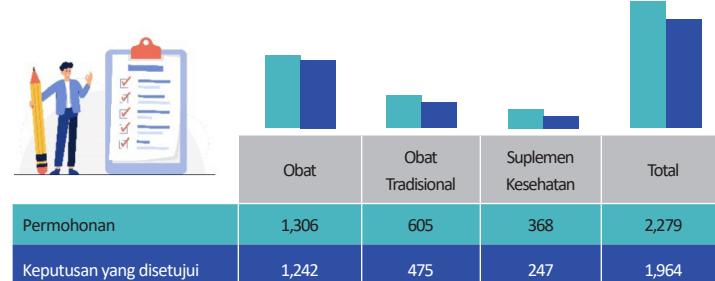
Sebelum Obat dan Makanan diproduksi atau diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia, Obat dan Makanan harus melalui registrasi oleh Badan POM untuk dievaluasi terkait aspek keamanan, khasiat dan mutu serta informasi melalui penandaan/label.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, telah diterbitkan 144.260 keputusan dan 136.389 persetujuan izin edar dari 173.616 berkas permohonan registrasi Obat dan Makanan.

Untuk melindungi masyarakat dari klaim yang menyesatkan, Badan POM telah melakukan evaluasi rancangan iklan terhadap kebenaran klaim iklan khusus obat bebas, obat bebas terbatas, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang telah mendapatkan ijin edar sebelum ditayangkan atau diedarkan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, dari 2.279 permohonan persetujuan rancangan iklan, telah disetujui 1.964 (86,17%) iklan.



Gambar 1. Profil Registrasi Obat dan Makanan



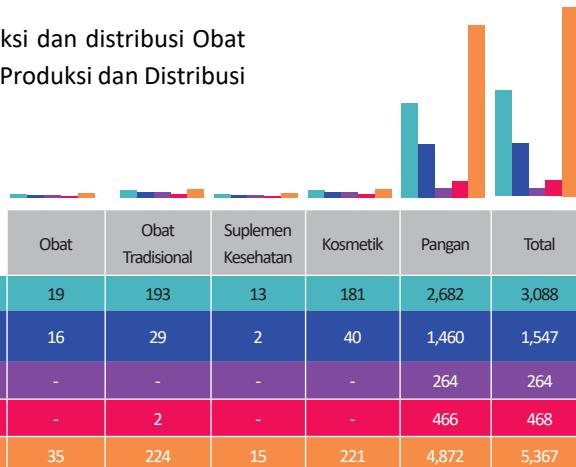
Gambar 2. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan Sebelum Beredar/Dipublikasikan

Pengawasan Post-market

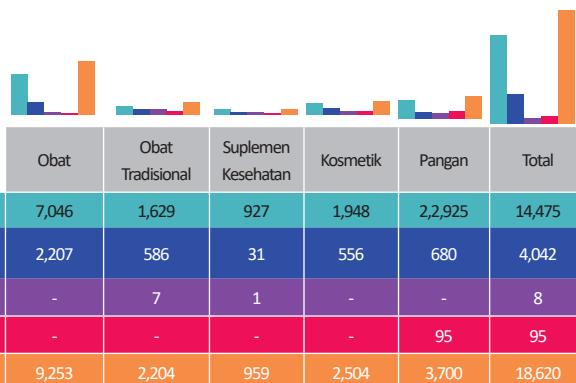
Pengawasan post-market dilakukan setelah produk beredar untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat dan bermutu serta informasi produk sesuai dengan yang disetujui, dilakukan melalui :

Badan POM melakukan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin kepatuhan implementasi Cara Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan Yang Baik.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 telah diperiksa sebanyak 5.367 sarana produksi Obat dan Makanan dengan 1.547 (28,82%) sarana adalah TMK.



Gambar 3. Profil Pemeriksaan Sarana Produksi Obat dan Makanan



Gambar 4. Profil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dan Makanan

Keterangan

TMK : Tidak Memenuhi Ketentuan
MK : Memenuhi Ketentuan

Sampling dan Pengujian Laboratorium

a. Targeted

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penarandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/Illegal/Palsu	Keda-luarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)	(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)		
Obat	Tageted	2.583	64	-	5	60	2.514	2.068	2.008	60	129	446	2.137
Obat tra-disional	Tageted	3.032	74	-	-	117	2.958	2.654	2.384	270	344	304	2.728
kuasi	Tageted	180	7	-	1	4	172	151	143	8	16	21	159
Suplemen Kesehatan	Tageted	862	22	-	-	8	840	785	732	53	75	55	807
Kosmetik	Tageted	5.874	5	-	-	393	5.869	5.111	4.679	432	437	758	5.116
Rokok	Tageted	149	-	-	-	9	149	19	16	3	3	130	19
Pangan	Tageted	10.256	2	3	6	584	10.245	8.184	7.293	891	902	2.061	8.195

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan III 2023

Tabel 1. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (*Targeted*)

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, dari 22.936 sampel *targeted* yang disampling terdapat 19.161 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 1.717 (8,96%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:
 MS = Memenuhi Syarat
 TMS = Tidak Memenuhi Syarat
 TIE = Tanpa izin Edar

b. Random

Komoditi	Metode Sampling	Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji		Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			TIE/ Illegal/ Palsu	Keda- luarsa	rusak				MS	TMS*			
		(a)	(b)			(c)	(d=a-b)	(e=f+g)	(f)	(g)	(h=b+g)	(i=d-e)	(j=b+e)
Obat	Random	11.245	326	-	-	247	10.919	9.992	9.465	527	853	927	10.318
Obat tradisional	Random	7.204	193	-	1	259	7.010	6.602	5.970	632	826	408	6.796
kuasi	Random	672	8	-	-	10	664	63	546	17	25	101	571
Suplemen Kesehatan	Random	1.945	43	-	-	25	1.902	1.734	1.595	139	182	168	1.777
Kosmetik	Random	14.656	20	3	-	748	14.633	12.961	12.185	776	799	1.672	12.984
Pangan	Random	8.289	5	-	1	632	283	6.883	6.144	739	745	1.400	6.889

Sumber: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) BB/BPOM Triwulan III 2023

Tabel 2. Profil Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan (*Random*)

Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, dari 44.011 sampel *random* yang disampling terdapat 39.335 sampel yang selesai diperiksa dan diuji laboratorium, dimana 2.830 (7,19%) sampel tidak memenuhi syarat.

Keterangan:

MS = Memenuhi Syarat

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

TIE = Tanpa izin Edar

Sertifikasi

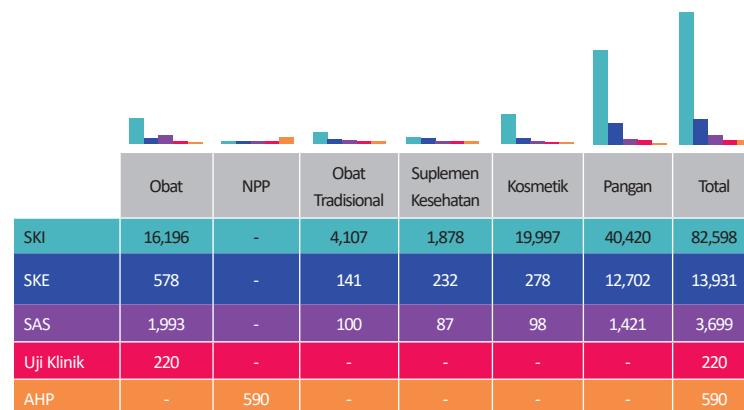
Dalam rangka mendorong ekspor dan impor pengawasan produk dan bahan baku yang masuk ke wilayah Indonesia, Badan POM mengeluarkan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), SAS (*Special Access Scheme*), Uji Klinik, dan AHP (Analisa Hasil Pengawasan) Obat dan Makanan. Sampai dengan Triwulan III tahun 2023 telah diterbitkan 82.598 SKI, 13.931 SKE, 3.699 SAS, 220 Uji Klinik, dan 590 AHP Obat dan Makanan.

Keterangan: * Termasuk Kuasi

Pengawasan Iklan

Untuk mencegah masyarakat mendapatkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang produk Obat dan Makanan, Badan POM melakukan pengawasan iklan produk di beberapa jenis media antara lain media cetak, televisi, radio, luar ruang dan *leaflet/brosur*. Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, dari 71.686 iklan Obat dan Makanan yang diawasi, 9.320 (13,00%) iklan tidak memenuhi ketentuan.

Keterangan: * Termasuk Kuasi



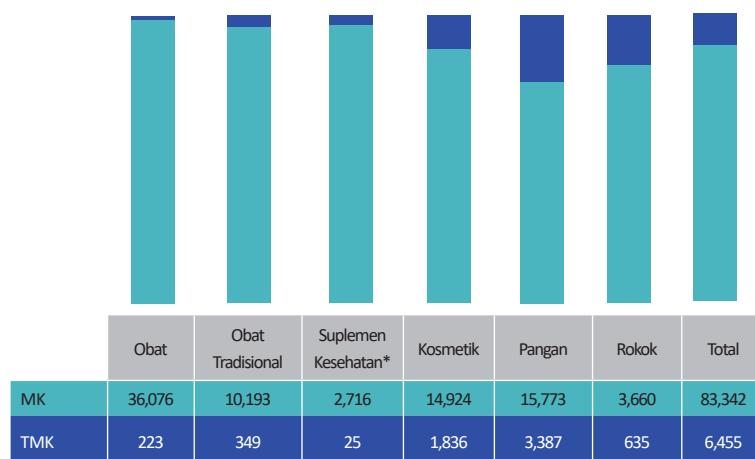
Gambar 5. Profil Sertifikasi Obat dan Makanan



Gambar 6. Profil Pengawasan Iklan Obat dan Makanan

Pengawasan Label

Badan POM juga mengawasi kesesuaian label produk Obat dan Makanan yang beredar dengan yang telah disetujui Badan POM, agar tidak memberikan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat. Sampai dengan Triwulan III tahun 2023, dari 89.797 label Obat dan Makanan yang diawasi, sebanyak 6.455 atau sekitar 7,19% label tidak memenuhi ketentuan.



Gambar 7. Profil Pengawasan Label Obat dan Makanan

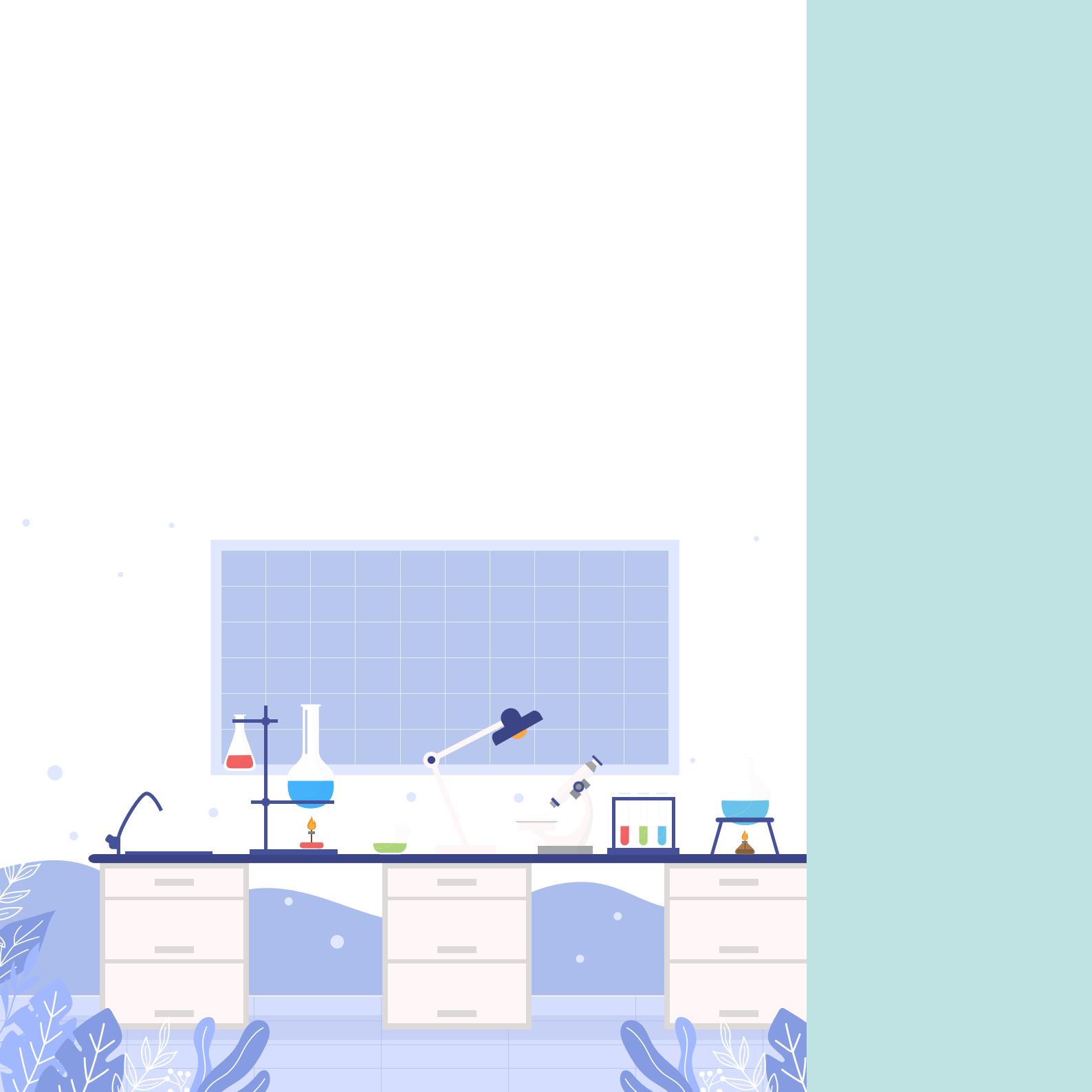
Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), Monitoring Efek Samping Suplemen Kesehatan (MESSK), Monitoring Efek Samping Kosmetik (MESKOS)

	Jumlah Laporan	Jumlah laporan Tindaklanjut	%
Obat	8.971	6970	77,69
Obat Tradisional	10	10	100,00
Suplemen Kesehatan	16	16	100,00
Kosmetik	630	602	95,56

Tabel 3. Profil Laporan Efek Samping

Penggunaan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik oleh berbagai kalangan masyarakat, maka resiko timbulnya efek yang tidak diinginkan tetap ada. Oleh karena itu, Badan POM melakukan evaluasi aspek keamanan produk yang beredar terhadap seluruh laporan efek samping yang diterima dari masyarakat dan/atau tenaga kesehatan, dengan membentuk Tim/Panitia:

- MESO, MESOT, dan MESSK terdiri dari ahli farmokologi/farmakologi klinik dan beberapa tenaga ahli lainnya.
- MESKOS terdiri dari dokter spesialis kulit.





Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2023 | BAB II

BAB II

Penindakan di Bidang Obat dan Makanan

1. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan strategi pencegahan kejahatan Obat dan Makanan, diperlukan basis data yang solid untuk kemudian dianalisis dan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan. Untuk membangun basis data tersebut, Badan POM menyusun aplikasi peta rawan kasus, yaitu peta yang menggambarkan kondisi terkini kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

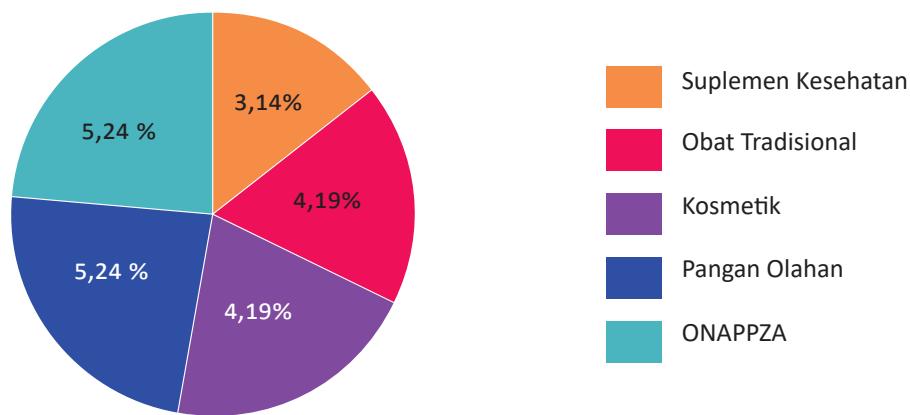


Gambar 8. Peta Rawan Kasus Obat dan Makanan

Sampai dengan Triwulan III 2023, data kasus yang sudah diverifikasi untuk menghasilkan data kerawanan kejahatan yang aktual sebanyak 2.466 kasus yang terdiri dari 847 kasus terkait obat, 572 kasus terkait obat tradisional, 13 kasus suplemen kesehatan, 838 kasus terkait kosmetik dan 196 kasus terkait komoditi pangan.

2. Hasil Operasi Intelijen

Peran Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan sangat strategis seiring dengan masih banyaknya temuan terkait Obat dan Makanan ilegal baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Salah satu upaya BPOM untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan melakukan kegiatan/operasi intelijen guna meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan baik di premarket maupun postmarket. Kegiatan/operasi intelijen telah dilaksanakan di berbagai daerah dengan berbagai kasus komoditi di antaranya kasus obat, NAPPZA, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan olahan baik yang berujung ditindaklanjuti dengan saksi administrasi maupun pro justicia



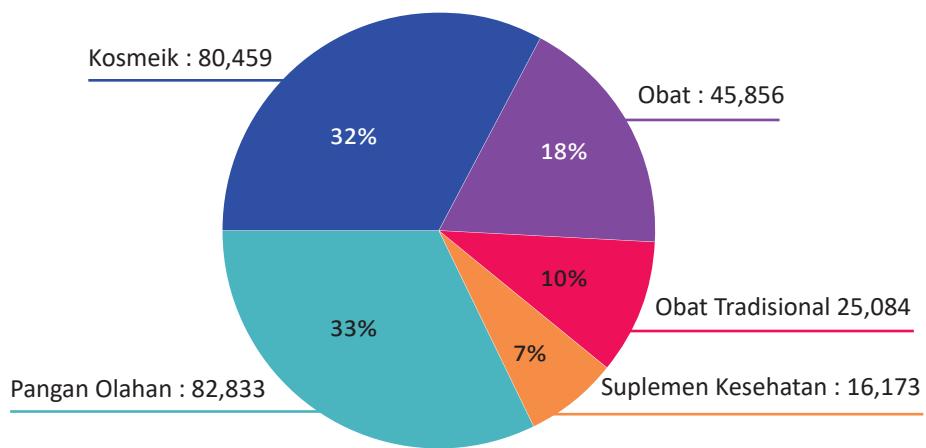
Gambar 9. Rekomendasi Intelijen yang Dihasilkan
Berdasarkan Komoditi s.d Triwulan III

Sampai dengan triwulan III, dari pelaksanaan kegiatan intelijen tersusun 141 laporan informasi, sedangkan dari pelaksanaan operasi intelijen tersusun 11 laporan intelijen. Dari seluruh rangkaian kegiatan dan operasi intelijen tersebut telah dihasilkan 21 rekomendasi intelijen dengan 4 kasus ONAPPZA, 2 kasus kosmetik, 3 kasus obat tradisional dan 4 kasus pangan olahan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh unit penerima rekomendasi.

3. Hasil Patroli Siber

Dalam rangka meningkatkan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring, Badan POM telah melakukan kegiatan patroli siber untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap penjualan produk obat dan makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan data hasil patroli siber Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III tahun 2023, ditemukan sebanyak 250.405 link yang teridentifikasi menjual Obat dan Makanan ilegal dan/atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



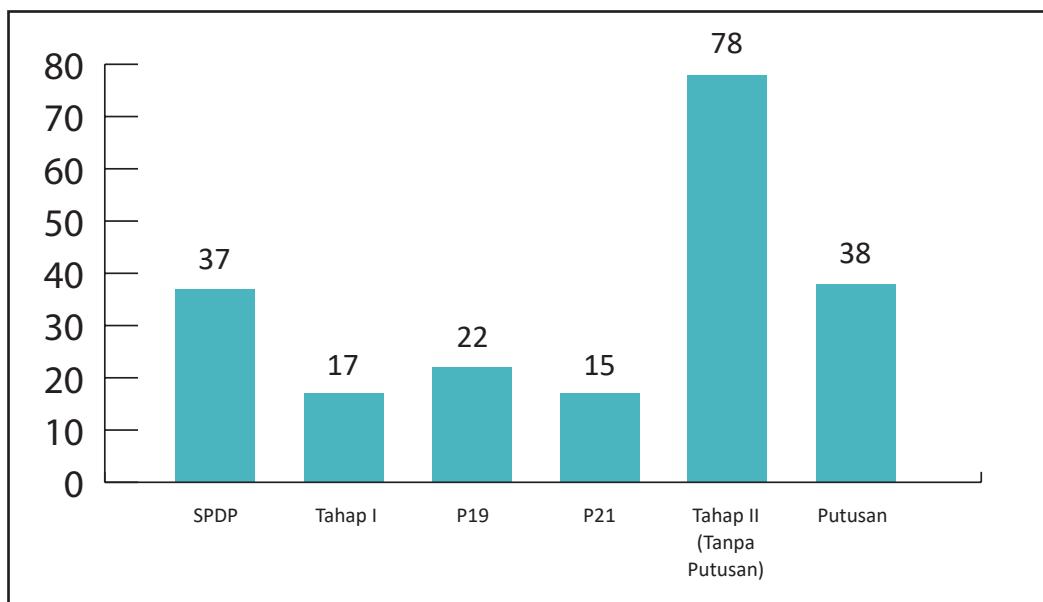
Gambar 10. Hasil Patroli Siber Obat dan Makanan
s.d Triwulan III 2023

4. Hasil Penyidikan Obat dan Makanan

Dalam rangka memberantas dan menertibkan peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, Badan POM secara terus menerus melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya (dalam kerangka Operasi Gabungan Nasional dan Operasi Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal).

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, PPNS Badan POM telah menindaklanjuti 207 perkara dengan pro Justitia. Sebanyak 37 perkara masih dalam tahap SPDP, 17 perkara pada tahap I, 22 perkara pada tahap P18/19, 15 perkara pada tahap P21, 78 perkara pada tahap II dan terdapat 38 perkara sudah mendapatkan putusan pengadilan.

Posisi Perkara di Bidang Obat dan Makanan



Gambar 11. Kemajuan Perkara Tindak Pidana Obat dan Makanan s.d Triwulan III 2023



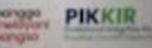
KONSULTASI PUBLIK

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA BPOM NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG KRITERIA DAN TATALAKSANA REGISTRASI OBAT

Jakarta, 10 Februari 2023



TANGGUNG
JAWAB
BPOM



PIKKIR



BAB III

Penyusunan Standar/Regulasi/Pedoman

Obat

Dalam rangka mengawal mutu Obat dan Makanan, telah disusun standar/regulasi/pedoman di bidang Obat dan Makanan.

Pada tahun 2023 terdapat 17 peraturan/standar/pedoman obat yang sedang dalam proses penyusunan. Daftar 17 peraturan/standar/pedoman obat beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pengawasan Penggunaan Obat dan Vaksin Covid-19 Pasca Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19 di wilayah Indonesia (100%).
2. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Cara Regulatori Obat yang Baik (100%).
3. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. HK.03.1.23.06.10.5166 tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kedaluwarsa pada Penandaan/Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan, dan Pangan (Hanya Substansi Obat) (25%).
4. Penyusunan Perubahan Keempat atas Peraturan Kepala BPOM No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (Lampiran XVI) (100%).
5. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Metodologi Spesifik Zat Aktif Uji Bioekivalensi (66,67%).
6. Pedoman Verifikasi Metode Analisis Kimia Obat dan Bahan Obat (66,67%).
7. Petunjuk Teknis Pemenuhan terhadap Kompendial Standar Mutu Untuk Penyusunan Farmakope Indonesia (66,67%)
8. Standar Mutu untuk Penyusunan Farmakope Indonesia (66,67%).
9. Rancangan Standar Obat Non Kompendial (66,67%).
10. Rancangan Keputusan Kepala BPOM Tentang Pedoman Penilaian Mutu dan Kemasan Produk Radiofarmaka (100%).
11. Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No. 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label (25%).
12. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. 26 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Analisa Hasil Pengawasan dalam Rangka Impor dan Eksport Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (50%).
13. Revisi Peraturan BPOM No. 34 Tahun 2018 Tentang tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (100%).

14. Surat Edaran No. 5 Tahun 2023 tentang Kualifikasi Pemasok Bahan Obat (100%)
15. Revisi Peraturan Kepala BPOM No. 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat (50%).
16. Revisi Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang diedarkan secara Daring (25%).
17. Revisi Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi (100%).

Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Terdapat 12 peraturan/standar/pedoman obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang disusun sampai dengan triwulan III tahun 2023. Daftar 12 peraturan/standar/pedoman tersebut sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional (80%).
2. Rancangan Pedoman Empiris Obat Tradisional (80%).
3. Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Uji Toksisitas Praklinik Secara In Vivo (Lampiran) (80%).
4. Pedoman Inovasi Teknologi dan Pendekatan Standardisasinya (80%).
5. Rancangan Revisi Peraturan Kepala BPOM No. 5 Tahun 2016 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan (80%).
6. Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik (80%).
7. Rancangan Peraturan BPOM tentang Pedoman Stabilitas Suplemen Kesehatan (80%).
8. Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2019 tentang Cemaran dalam Kosmetik (80%).
9. Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (80%).
10. Rancangan Revisi Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2019 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Kosmetika (60%).
11. Rancangan Keputusan Kepala BPOM Tentang Daftar Periksa pada Ruang Lingkup Dokumen Teknis dan Sarana dalam rangka Pemberian Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik 100%.
12. Rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Perubahan Bahan yang Diizinkan dalam Kosmetik (90%).

Sampai dengan Triwulan II ini telah diselesaikan 95 kajian dan 94 kajian (98,95%) diselesaikan tepat waktu (tidak lebih dari 85 hari kerja). Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.

Pangan

Terdapat 11 peraturan/standar/pedoman pangan olahan yang disusun pada tahun 2023. Daftar 11 peraturan/standar/pedoman beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III sebagai berikut:

1. Pedoman Pengkajian Penetapan Kategori Pangan (70%).
2. Revisi Peraturan BPOM No. 7 Tahun 2018 tentang Bahan Baku yang Dilarang Dalam Pangan Olahan (100%).
3. Penyusunan Naskah Kebijakan terkait *Date Marking (Use-By dan Best-Before Date)* Produk Pangan dalam rangka mendukung Produksi Berkelanjutan (70%).
4. Pedoman Meminimalkan Potensi AMR Bawaan Pangan Olahan (*Foodborne AMR*) (70%).
5. Pedoman/Kode Praktis Mitigasi Risiko terkait Cemaran (MCPDE-GE, BPA) (70%).
6. Pedoman Fasilitasi Standardisasi Keamanan, Mutu, dan Manfaat Produk Inovasi Pangan Olahan (70%).
7. Revisi Peraturan BPOM No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan (70%).
8. Pedoman Implementasi Regulasi Pangan Berasam Rendah untuk UMKM (100%).
9. Penetapan Informasi Nilai Gizi Pada Bagian Depan Label Yang Mudah Dipahami Masyarakat (70%).
10. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan (20%).
11. Revisi Peraturan BPOM No. 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) (70%).

Badan POM juga menyusun kajian terkait pangan olahan. Sampai dengan triwulan III telah diselesaikan 112 kajian dan seluruhnya diselesaikan tepat waktu. Penyusunan kajian dilakukan berdasarkan permintaan dari *stakeholder*.



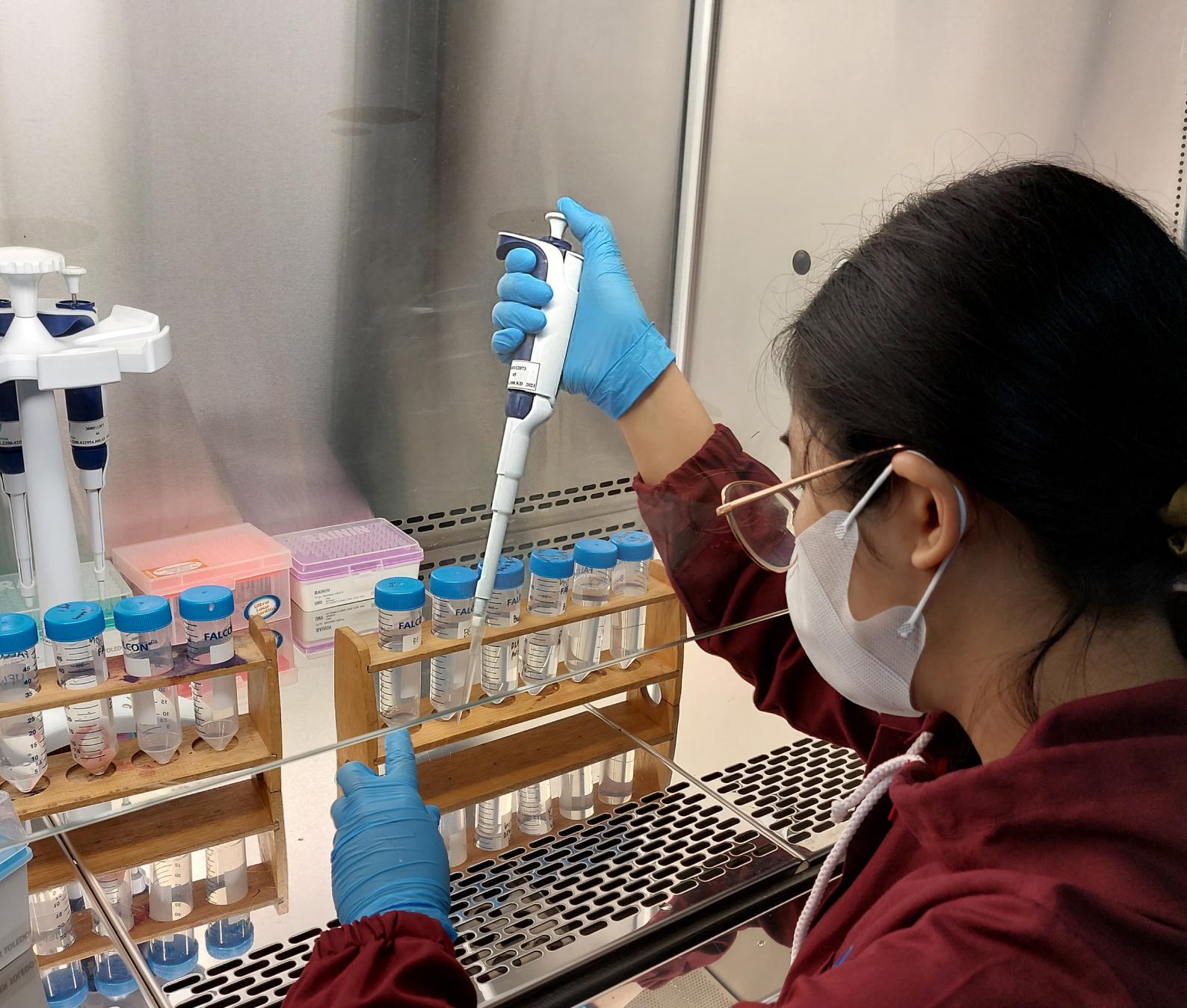


BAB IV

Analisis Kebijakan Obat dan Makanan

Analisis kebijakan Obat dan Makanan dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus dasar penyusunan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan, selain itu data hasil riset dan kajian yang berupa informasi dan rekomendasi juga dimanfaatkan untuk mengetahui dan meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat penambahan sebanyak 1 topik kajian pada bulan Mei, sehingga jumlah total topik kajian menjadi 11 topik. Daftar 11 topik riset dan kajian prioritas yang dilaksanakan Badan POM beserta progres penyusunan sampai dengan triwulan III pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pengukuran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu dan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan (80%).
2. Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan (90%).
3. Kajian Evaluasi Indikator Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat (70%).
4. Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan (90%).
5. Pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Bimbingan dan Pembinaan BPOM (75%).
6. Analisis Kebijakan dan Peran BPOM dalam Pengembangan Industri Farmasi (70%).
7. Analisis Kebijakan Pengawasan Antibiotik Kelompok Reserve di Fasilitas Pelayanan Kesehatan/Kefarmasian (83%).
8. Kajian Polutan Farmasi pada Produksi Obat dan Makanan (79%).
9. Penyediaan Data Profil Pengawasan Obat dan Makanan (65%).
10. Analisis Risiko Keamanan Pangan Indonesia Risk Assessment Center (INARAC) (80%).
11. Evaluasi Program Penataan dan Perkuatan UPT POM (71%)



BAB V

Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan

1. Metode Analisis yang Dikembangkan

Badan POM terus mengembangkan metode analisis (MA) Obat dan Makanan agar dapat melakukan pengujian keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar. Pengembangan metode analisis dilakukan untuk komoditi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, produk biologi, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, air, mikrobiologi dan biologi molekuler. Hasil pengujian digunakan untuk membuat kebijakan bahkan penindakan terkait pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Sampai dengan triwulan III telah dikembangkan 158 metode analisis.

2. Baku Pembanding yang Dikembangkan

Pengembangan Baku Pembanding (BP) dapat dimanfaatkan oleh Balai Besar/ Balai POM untuk memperkuat pengawasan Obat dan Makanan melalui pengujian laboratorium. Sampai dengan triwulan III tahun 2023 telah dikembangkan 77 baku pembanding.

3. Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu

Badan POM selalu berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholder* melalui pelayanan pengujian Obat dan Makanan termasuk sampel pengujian produk biologi dan sampel *lot release* vaksin dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat.

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, terdapat 1.886 sampel yang diterima oleh laboratorium PPPOMN. Dari 1.699 sampel yang telah selesai uji, sebanyak 1.696 sampel yang telah selesai uji memenuhi ketentuan *timeline* sehingga persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu sebesar 99,82%.

4. Alat Pengujian Laboratorium Badan POM yang Dikalibrasi Sesuai Standar

Untuk menjamin validitas pengujian Obat dan Makanan di laboratorium diperlukan alat yang sudah terkalibrasi sesuai standar ISO IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Sampai dengan triwulan III tahun 2023, telah dilakukan kalibrasi terhadap 2.850 peralatan laboratorium.

5. Jejaring Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif

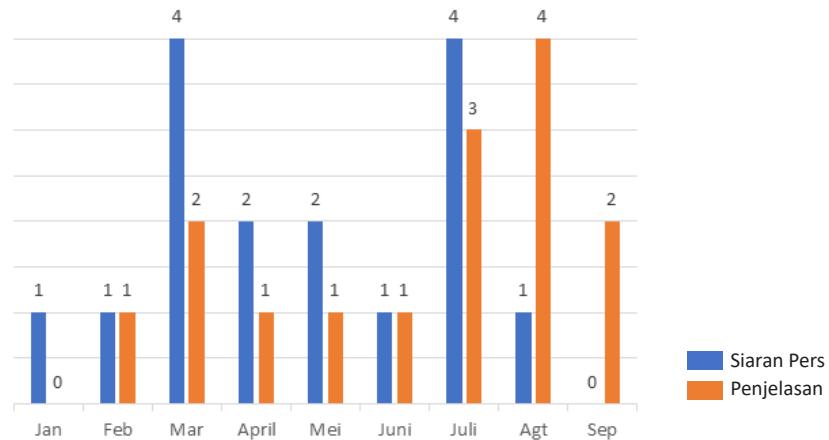
Kegiatan jejaring laboratorium pengujian Obat dan Makanan merupakan kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas laboratorium uji, *sharing* informasi dan teknologi terkini yang sesuai dengan target dari jejaring tersebut. Kegiatan dapat berupa pertemuan, uji profisiensi, kolaborasi, pelatihan, *workshop*, FGD yang diikuti oleh laboratorium di lingkungan Badan POM maupun eksternal sesuai lingkup pengujian/ keahlian. Pada tahun 2023, Badan POM menargetkan partisipasi dalam 12 jejaring laboratorium. Sampai dengan triwulan III tahun 2023, Badan POM telah berpartisipasi dalam 11 jejaring laboratorium.



BAB VI

Optimalisasi Pemberdayaan Mitra Kerja dan Masyarakat

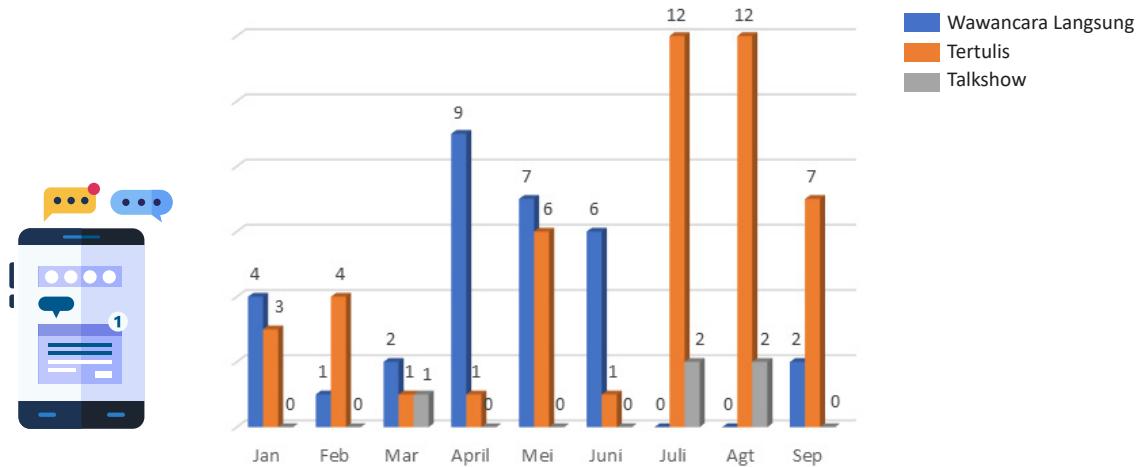
Sampai dengan triwulan III tahun 2023, Badan POM telah menerbitkan 16 siaran pers dan 15 penjelasan/klarifikasi Badan POM terkait isu Obat dan Makanan. Penerbitan siaran pers dan penjelasan/klarifikasi paling banyak terjadi di bulan Juli sebanyak 4 siaran pers dan 3 penjelasan/klarifikasi.



Gambar 12. Data Publikasi Siaran Pers dan Penjelasan/Klarifikasi s.d. Triwulan III 2023

Pembahasan isu bervariasi dari berbagai komoditas, antara lain obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan umum/kinerja. Topik yang paling sering dibahas sepanjang triwulan III tahun 2023 yaitu terkait komoditas obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (7 siaran pers). Seluruh siaran pers dan penjelasan/clarifikasi berita dipublikasikan melalui [website](#) dan media sosial BPOM.

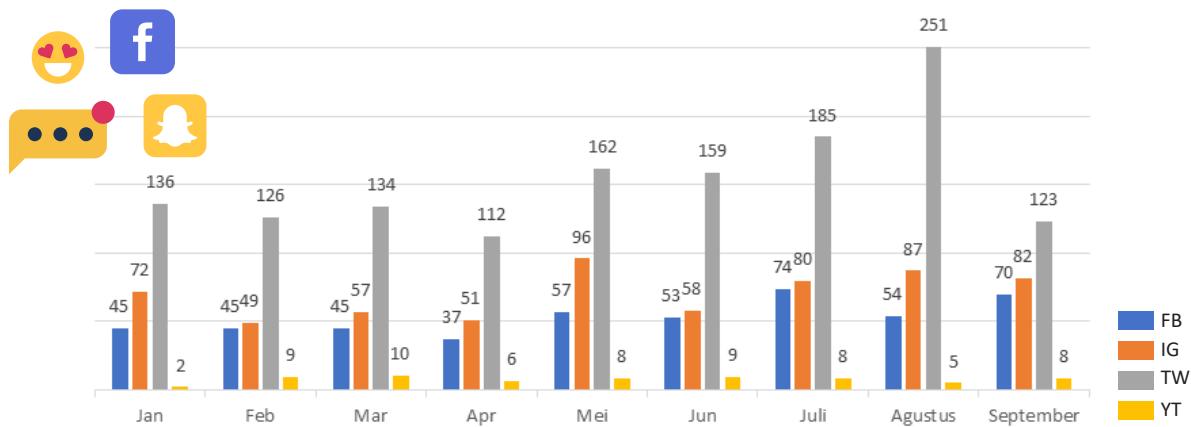
BPOM juga secara aktif menyampaikan informasi seputar kegiatan strategis yang dilakukan Badan POM melalui berita aktual yang diunggah melalui website resmi Badan POM dan disebarluaskan kepada media massa. Tercatat sebanyak 85 berita aktual telah dipublikasikan, yang merupakan hasil peliputan kegiatan Badan POM sampai dengan triwulan III tahun 2023.



Gambar 13. Data Kegiatan Pelayanan Informasi kepada Media s.d. Triwulan III 2023

Hingga triwulan III tahun 2023, Badan POM melakukan kegiatan pelayanan informasi kepada media berupa wawancara/talkshow serta pemberian jawaban tertulis. Dengan rincian kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan adalah 31 wawancara langsung, 47 jawaban tertulis dan 5 pemenuhan narasumber untuk program talkshow.

Pada triwulan III tahun 2023, aktivitas media sosial Badan POM pada 4 *platform* media sosial yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube cukup aktif dengan rata-rata 2-3 unggahan konten per hari. *Platform* Twitter adalah *platform* yang memiliki aktivitas tertinggi sebanyak 559 tweets dibandingkan dengan 3 *platform* media sosial lainnya. Aktivitas tertinggi kedua adalah Instagram dengan 249 unggahan, menyusul Facebook sebanyak 198 unggahan, serta Youtube sebanyak 21 unggahan. Sedangkan total unggahan media sosial sampai dengan triwulan III 2023 di berbagai *platform* sebagai berikut:



Gambar 14. Total Unggahan Media Sosial Badan POM Berdasarkan *Platform* s.d. Triwulan III 2023

Secara garis besar, total unggahan sampai dengan triwulan III 2023 di berbagai *platform* adalah 2.565 konten. Rincian jumlah unggahan per bulannya adalah 255 unggahan di bulan Januari, 229 unggahan di bulan Februari, 246 unggahan di bulan Maret, 206 unggahan di bulan April, 323 unggahan di bulan Mei, 279 unggahan di bulan Juni, 347 unggahan di bulan Juli, 397 unggahan di bulan Agustus dan 283 unggahan di bulan September.

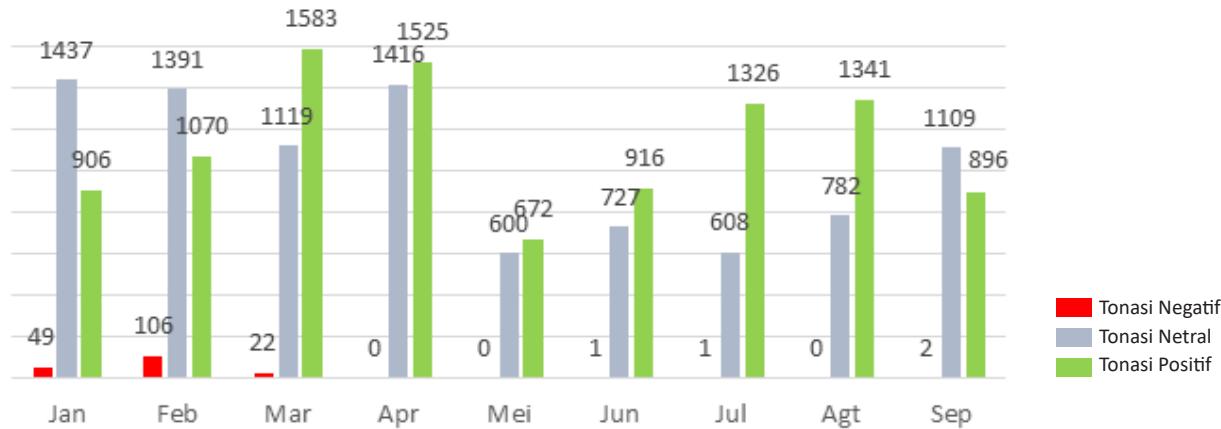


Top engagement content terkait Badan POM pada keempat *platform* dapat dilihat pada gambar berikut:

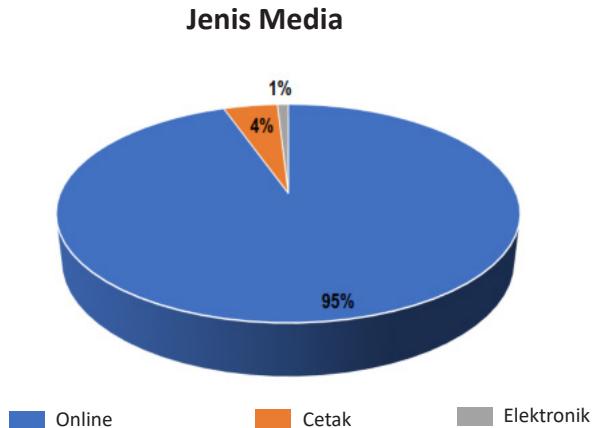


Gambar 15. Top engagement content terkait Badan POM pada *platform* Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube pada Triwulan II 2023

Pemberitaan terkait Obat dan Makanan maupun Badan POM sampai dengan triwulan III tahun 2023 mencapai 19.605 pemberitaan, yang terdiri dari 52,21% berita bertonasi positif (10.235 berita), 46,87% bertonasi netral (9.189 berita), dan 0,92% bertonasi negatif (181 berita). Tonasi berita positif muncul dari berbagai kegiatan Badan POM serta banyaknya pernyataan Badan POM dalam sebuah isu yang dikutip media, sedangkan tonasi netral muncul dari pemberitaan dengan topik Obat dan Makanan yang tidak mengutip Badan POM.



Gambar 16. Tren Tonasi Pemberitaan Terkait Isu Obat dan Makanan s.d. Triwulan III 2023



Gambar 17. Diagram Sebaran Pemberitaan Badan POM di Media s.d. Triwulan III 2023

Berdasarkan jenis media, media yang memberitakan terkait Badan POM dan isu Obat dan Makanan hampir seluruhnya berasal dari media *online* sebesar 94,61% (18.548 berita), sedangkan media cetak 4,48% (879 berita) dan media elektronik 0,91% (178 berita).

Sampai dengan triwulan III 2023 terdapat berbagai topik pemberitaan yang terkait dengan Badan POM. Pada bulan Juli, pemberitaan didominasi oleh temuan 1.541 produk kosmetik ilegal di seluruh Indonesia berdasarkan penelusuran Badan POM sepanjang tahun 2022. Bukan hanya kosmetik, sederet obat juga ditemukan Badan POM mengandung bahan kimia obat dan diedarkan tanpa izin. Konferensi pers Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai) menjadi pemberitaan terbanyak pada bulan Agustus 2023. Dirjen Bea Cukai dan Badan POM berhasil menggagalkan pengiriman 430 karton obat tradisional ilegal dengan total berat 5 ton. Kepala Badan POM katakan obat tradisional yang akan dikirim ke Uzbekistan tersebut mengandung bahan kimia obat. Pada September 2023, pemberitaan terbanyak tentang regulasi platform *e-commerce*. Pemerintah siap mengenakan sanksi keras hingga penutupan izin media sosial yang sekaligus melakukan aktivitas jual beli elektronik karena merugikan sebagian pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

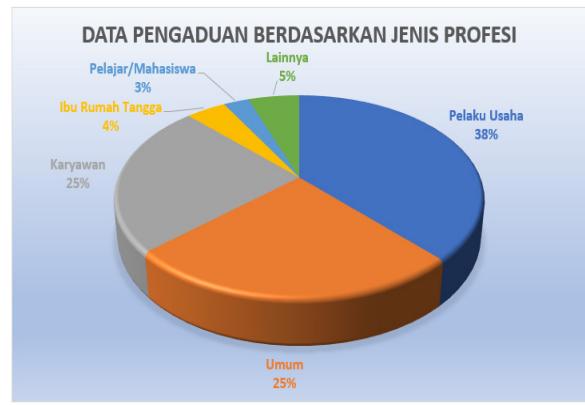
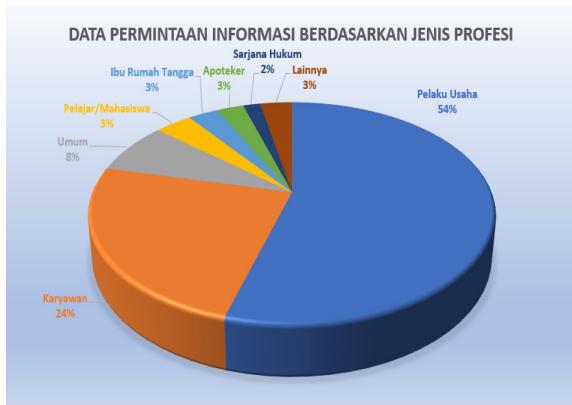




Gambar 18. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan s.d. Triwulan III Tahun 2023

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, Badan POM menerima 108 permintaan informasi publik dari masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dari seluruh permintaan tersebut, 100 (92%) permintaan informasi dikabulkan sepenuhnya, 5 (5%) permintaan informasi yang dikabulkan sebagian, dan 3 (3%) permintaan informasi yang ditolak. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian dan ditolak tersebut karena terdapat informasi yang tidak dikuasai dan termasuk ke dalam Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Seluruh permintaan informasi dapat diselesaikan sesuai jangka waktu penyelesaian (tidak lebih dari 17 hari kerja).

Berdasarkan data layanan informasi dan pengaduan masyarakat sampai dengan triwulan III 2023, Badan POM telah melaksanakan layanan informasi dan pengaduan masyarakat melalui ULPK Pusat dan 73 Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia serta *Contact Center HALOBPOM* sebanyak 42.143 layanan, terdiri dari 40.533 (96.18%) layanan permintaan informasi dan 1.610 (3.82%) layanan pengaduan.



Gambar 19. Profil Pengguna Layanan Informasi dan Pengaduan Badan POM Berdasarkan Profesi

Profil profesi masyarakat yang mengakses layanan informasi sebagian besar berasal dari pelaku usaha sebanyak 22.436 (55,35%) layanan dan karyawan sebanyak 10.156 (25%) layanan. Adapun pengaduan sebagian besar dari pelaku usaha sebanyak 613 (38,07%) layanan dan karyawan sebanyak 398 (24,72%) layanan.





BAB VII

Digitalisasi Pelayanan Publik

1. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital (2D Barcode)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Digital pada tahun 2023 dilakukan penyempurnaan melalui pelaksanaan pengadaan, sistem TTAC akan dilengkapi dengan informasi *e-labeling* (informasi penandaan produk secara digital) mendukung informasi produk obat secara digital. Kegiatan ini juga didukung dengan kinerja melalui strategi percepatan implementasi melalui pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan POM pada tahun 2023, antara lain dengan:

- a. melakukan *desk* konsultasi baik secara tatap muka sebanyak 12 kali dengan 17 pelaku usaha yang terdiri dari PT Bina San Prima, PT Takeda Indonesia, PT Konimex Indonesia, PT Eisai Indonesia, Korean United Pharm, PT Dion, PT Astrazeneca Indonesia, PT Alcon Tbk, PT Actavis Indonesia, PT Darya Varia Laboratories, PT Fresenius Kabi, PT Combiphar Indonesia, PT Hyphens Pharma, PT Merck Sharp Dohme, PT Kimia Farma, PT Organon Pharma Indonesia, dan PT Teknologi Medika Pratama
- b. melakukan *helpdesk* teknis dan substansi melalui email sebanyak 139 laporan yang ditindaklanjuti.

Dalam rangka percepatan implementasi 2D *Barcode*, Badan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha serta sosialisasi kepada masyarakat.



2. BPOM Mobile

BPOM Mobile merupakan aplikasi *mobile* yang memudahkan masyarakat dalam melakukan verifikasi produk dengan cara memindai 2D *Barcode* yang ada pada kemasan, memberikan kemudahan akses berita *up to date* serta kemudahan akses informasi dan pengaduan terhadap produk Obat dan Makanan. Inovasi teknologi dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui pembangunan aplikasi BPOM Mobile dimulai sejak tahun 2018. Aktivitas BPOM Mobile sejak 2018 hingga 30 September 2023 sebagai berikut:



Gambar 20. Aktivitas pada BPOM Mobile Periode 2018 – 30 September 2023

3. Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT)

Pada triwulan III, telah dikembangkan beberapa fitur untuk menunjang pelaksanaan pengawasan *post-market* Obat dan Makanan di antaranya adalah penyempurnaan *dashboard* dan *tracking* sampel, pencatatan tindak lanjut hasil pengujian dan manajemen master data.

Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan publik, telah dilakukan pembahasan dan diskusi bersama perwakilan UPT Badan POM dan unit Pusat secara *hybrid* pada tanggal 6-7 September 2023 terkait penyempurnaan sistem layanan pengujian sampel pihak ketiga. Output dari kegiatan ini bertujuan agar ke depan masyarakat khususnya pelanggan Badan POM dapat lebih mudah dalam memanfaatkan layanan pengujian sampel di laboratorium UPT Badan POM.

Pengawasan *post-market* produk senantiasa dilakukan oleh Badan POM dalam upaya memastikan produk Obat dan Makanan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Berikut ini adalah ringkasan jumlah data pengawasan *post-market* Obat dan Makanan yang telah dientri melalui aplikasi SIPT.



Pemanfaatan SIPT 2023

Nasional. Periode 1 Januari – 3 Oktober 2023

pemeriksaan sarana

30.596 data

sampling pengujian

70.786 sampel

pengawasan iklan

23.711 data

penandaan

77.176 data

*Data ditarik per 3 Oktober 2023

Gambar 21. Statistik Pemanfaatan SIPT s.d. Triwulan III Tahun 2023

4. Aplikasi Kelembagaan (Evortal)

Dari hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP), Badan POM sudah termasuk dalam kategori instansi yang “Informatif”. Untuk mempertahankan predikat instansi informatif maka Badan POM harus terus melakukan Monev KIP yang diimplementasikan secara menyeluruh baik di Pusat maupun UPT. Oleh karena itu, dikembangkan menu Monev KIP pada aplikasi Evortal sebagai bentuk inovasi pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait tingkat kepatuhan keterbukaan informasi di lingkungan BPOM. Tata cara penggunaan monev KIP telah terlebih dahulu disosialisasikan sejak 12 April 2023 kepada seluruh UPT melalui *hybrid* baik luring di Pusat maupun daring via aplikasi zoom. Selama triwulan III aplikasi Evortal menu Monev KIP telah digunakan dalam penilaian Monev KIP.

5. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Pusat Data Nasional (PDN) merupakan upaya mewujudkan mandat Presiden untuk melakukan percepatan transformasi digital serta merujuk pada mandat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui penyediaan PDN ini diharapkan konsolidasi layanan dan data pemerintah dapat berlangsung lebih awal. Kebijakan ini akan mendorong efisiensi belanja pemerintah, meningkatkan kualitas layanan, terwujudnya Satu Data Indonesia serta meningkatkan jaminan keamanan *e-Government* (SPBE) dan kedaulatan data negara.

Badan POM sudah 100% memanfaatkan layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNs) Kementerian Kominfo sekaligus menjadi salah satu K/L pionir yang pertama kali melakukan 100% migrasi sistem informasi/aplikasi yang sebelumnya dikelola mandiri ke dalam layanan PDN Kementerian Kominfo. Sebanyak 174 aplikasi/sistem informasi (layanan internal dan eksternal domain Badan POM) telah berhasil dilakukan migrasi ke PDN Kementerian Kominfo, sehingga kebutuhan server BPOM sudah difasilitasi seutuhnya oleh Kementerian Kominfo. Dengan peralihan ini, anggaran yang pada awalnya dialokasikan untuk pembelian server dan pemeliharaan *data center* dapat dialihkan untuk kebutuhan pengembangan TIK lainnya.

Sebagai upaya perbaikan berkelanjutan, perlu terus dilakukan peningkatan koordinasi antara Badan POM, pihak ketiga pengembang aplikasi/sistem informasi, Kementerian Kominfo dan BSSN untuk menjamin keamanan dan ketersediaan layanan publik dan layanan internal BPOM.





Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2023 | BAB VIII

BAB VIII

Perkuatan Peraturan Perundang-Undangan Pengawasan Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, telah ditetapkan 24 Peraturan Badan POM, 85 Keputusan Kepala Badan POM, dan 83 Rumusan Perjanjian. Selain itu Badan POM telah melakukan pembahasan satu Rancangan Undang-Undang dan tiga Rancangan Peraturan Pemerintah. Bersama dengan Kementerian Kesehatan, Badan POM turut serta dalam pembahasan RPP tentang Revisi PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

1 Judul Rancangan Undang- Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan.

3 Judul Rancangan Peraturan Pemerintah

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Badan POM
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan

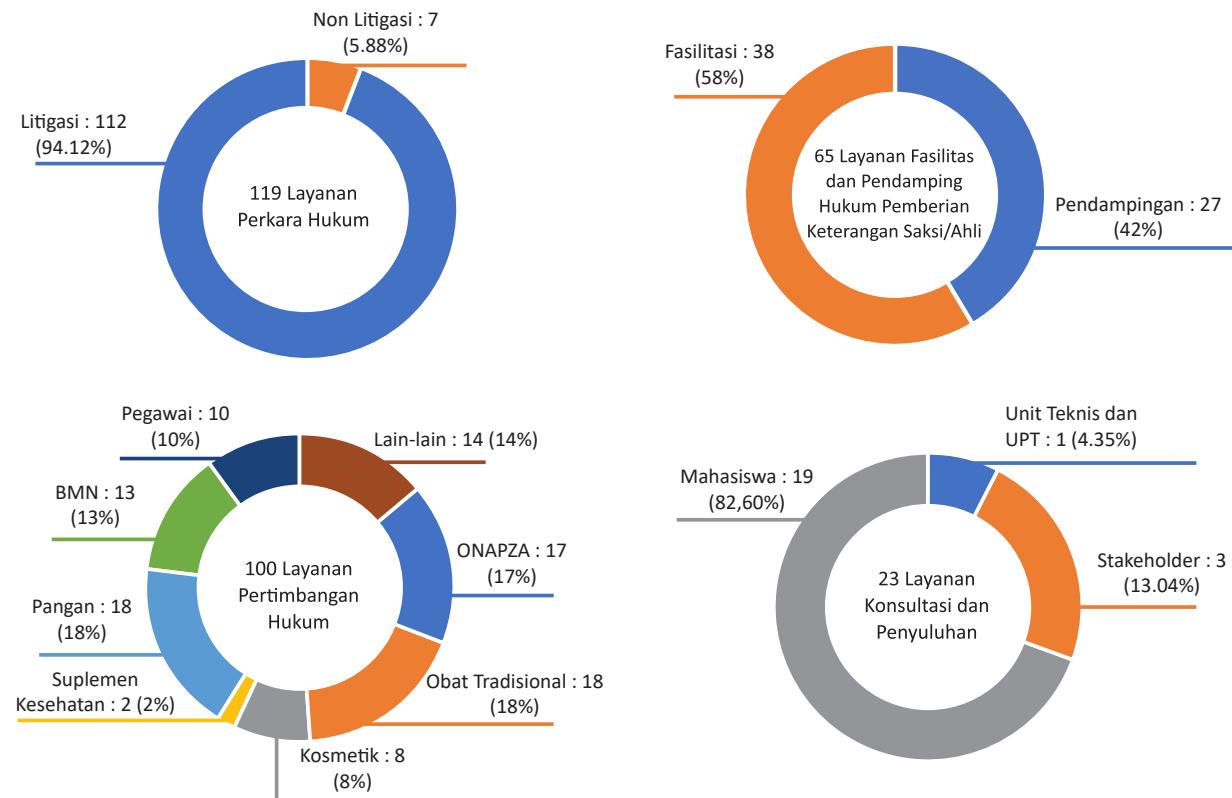
Judul Peraturan Badan POM

1. Peraturan Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Sertifikasi Pelulusan Bets/Lot Vaksin.
2. Peraturan Badan POM Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengkajian Keamanan dan/atau Mutu Obat dan Bahan Obat Terhadap Cemaran Nitrosamin
3. Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
4. Peraturan Badan POM Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
5. Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
6. Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
7. Peraturan Badan POM Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat Kuasi
8. Peraturan Badan POM Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Khasiat dan Keamanan Obat Antibakteri
9. Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penilaian Mutu Produk Obat Inhalasi dan Nasal
10. Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan
11. Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2023
12. Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik
13. Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Kategori Pangan

14. Peraturan Badan POM Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelaporan Kegiatan Industri Farmasi Dan Pedagang Besar Farmasi
15. Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Bpom Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat
16. Peraturan Badan POM Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pembuatan Dan Peredaran Obat Tradisional, Obat Kuasi, Dan Suplemen Kesehatan
17. Peraturan Badan POM Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk Kosmetik
18. Peraturan Badan POM Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
19. Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan
20. Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pedoman Uji Farmakodinamik Praklinik Obat Tradisional
21. Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan
22. Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Bahan Baku Yang Dilarang Dalam Pangan Olahan Dan Bahan Yang Dilarang Digunakan Sebagai Bahan Tambahan Pangan
23. Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan
24. Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan Dan Mutu Suplemen Kesehatan

Layanan Advokasi Hukum (Pelayanan Hukum)

Setiap instansi pemerintah perlu mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan tugas dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan implikasi hukum yang berisiko bagi organisasi. Salah satu aspek hukum adalah layanan advokasi hukum yang terdiri dari pelaksanaan pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara hukum, pelaksanaan pendampingan kepada saksi/ahli serta pelaksanaan konsultasi dan penyuluhan hukum. Jumlah dan jenis layanan advokasi hukum yang sudah dilakukan oleh Badan POM sampai dengan triwulan III tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 22. Layanan Advokasi Hukum yang Diberikan oleh Badan POM s.d. Triwulan III 2023





Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2023 | BAB IX

BAB IX

Penguatan dan Penataan Organisasi dan Tata Laksana serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. Penataan dan Penguatan Organisasi

Berdasarkan hasil evaluasi dan penataan UPT BPOM, BPOM telah mendapatkan secara tertulis Izin Prinsip Menteri PANRB terhadap perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM, peningkatan klasifikasi 8 Loka POM menjadi Balai POM, pembentukan 3 Loka POM baru, serta perubahan nama, lokasi, dan wilayah kerja 45 UPT Badan POM. Sebagai tindak lanjut, Badan POM telah melakukan penetapan dua Peraturan BPOM sebagai berikut:

- a. Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.
- b. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM.

Peraturan BPOM ini telah disosialisasikan tanggal 6 September 2023 yang dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama, serta seluruh UPT BPOM.

2. Tata Laksana

a. *Entry Meeting Pelaksanaan Audit Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015, ISO 37001:2016, dan ISO 45001:2018 BPOM*

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (QMS) BPOM. Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 lebih difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko.

- 1) Aspek kepemimpinan, komitmen dan peran Pimpinan BPOM, Kepala Unit Kerja Pusat, dan Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM sangat menentukan penerapan QMS BPOM secara konsisten di unit organisasinya masing-masing.
- 2) Aspek perencanaan berbasis risiko, implementasinya diintegrasikan dengan pengendalian risiko berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).



Sesuai dengan surat Sekretaris Utama Nomor OT.02.02.2.22.08.23.19 tentang *Entry Meeting Audit ISO 9001:2015, 37001:2016 dan 45001:2018 BPOM Tahun Anggaran 2023* pada tanggal 21 Agustus 2023 telah diadakan entry meeting pelaksanaan Audit Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015, 37001:2016 dan 45001:2018 yang dipimpin oleh Sekretaris Utama selaku Deputi Manajemen Puncak dan dihadiri oleh 104 yang terdiri dari 31 Unit Kerja Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM di Kabupaten/Kota dan perwakilan *Lead Auditor* dari PT Sucofindo sebagai pemenang pengadaan jasa konsultansi kegiatan Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015, 37001:2016 dan 45001:2018 BPOM secara luring dan daring.

**b. Entry Meeting Evaluasi Penilaian Mandiri
Penyelenggaraan SPIPT BPOM Tahun 2023**



Gambar 23. Proses dan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIPT Badana POM Tahun 2023

c. Pelaksanaan Audit Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015 BPOM Tahun Anggaran 2023

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugasnya, Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik telah menerapkan sistem manajemen mutu (*quality management system*) melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Selanjutnya, untuk tahun 2023 dilakukan:

- 1) Audit Surveilan ISO 9001:2015 BPOM berupa:
 - a) *on site* audit terhadap 32 Unit Organisasi BPOM yang terdiri atas Manajemen Puncak, 30 Unit Kerja Pusat, dan Balai Besar POM di Mataram.
 - b) *remote audit* terhadap 53 Unit Organisasi BPOM yang terdiri atas 32 Balai Besar/Balai POM dan 21 Loka POM di Kabupaten/Kota.
- 2) Audit Resertifikasi ISO 9001:2015 berupa *on site* audit terhadap Balai POM di Tarakan dan 18 Loka POM di Kabupaten/Kota.
- 3) Audit Surveilan ISO 37001:2016 berupa
 - a) *on site* audit terhadap Inspektorat Utama, Biro Umum, Direktorat Registrasi Pangan Olahan, dan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
 - b) *remote audit* terhadap Balai Besar POM di Jakarta dan Balai Besar POM di Bandung.
- 4) Audit Surveilan ISO 45001:2018 berupa *on site* audit terhadap Balai Besar POM di Mataram



d. Pemantauan Pelaksanaan Audit Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018 BPOM Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Surveilan ISO 9001:2015 BPOM Nomor PL.02.03.251.022.08.23.586 pada tanggal 2 Agustus 2023 telah ditetapkan PT Sucofindo sebagai penyedia eksternal pada Pengadaan Surveilan dan Resertifikasi ISO 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018 BPOM Tahun Anggaran 2023. Agenda pelaksanaan kegiatan audit eksternal dilakukan dari tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan 13 Desember 2023. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan oleh PT Sucofindo terhadap beberapa unit kerja di lingkungan BPOM. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memonitoring pelaksanaan audit eksternal ISO 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018 pada Unit Kerja di lingkungan BPOM yang dilakukan secara *on site* audit dan *remote audit* oleh PT Sucofindo sebagai penyedia jasa terkait pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan Kinerja Penyedia Audit Eksternal ISO 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018 dilakukan pada 15 Unit Kerja secara *on site* dan *remote* Diharapkan dari hasil evaluasi ini menjadi masukan untuk penyedia dalam pelaksanaan kegiatan audit eksternal ISO 9001:2015, 37001:2016, dan 45001:2018 tahun depan.





BAB X

Kerjasama Internasional

1. Kolaborasi SEARN untuk Peningkatan Akses Produk Obat dan Alat Kesehatan

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *World Health Organization South-East Asia Regulatory Network* (WHO-SEARN) *Assembly*, pada Senin-Kamis, 24–27 Juli 2023. Badan POM yang secara aktif berpartisipasi pada forum SEARN bersama dengan Kementerian Kesehatan, mendukung penuh penyelenggaraan SEARN *Assembly*. SEARN *Assembly* bertujuan untuk menghasilkan keputusan tertinggi dan bersifat strategis oleh jejaring regulator berdasarkan konsensus anggota SEARN, untuk mengadopsi output *draft strategy workplan* yang dibahas pada *working group and steering group*.

SEARN *Assembly* tahun 2023, selain dihadiri oleh 5 Kepala Otoritas Regulator Obat dari 11 negara anggota, juga dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, India, Thailand, Maldives, dan Bangladesh sebagai anggota *Steering Group*, Ketua *Working Group*, dan WHO. Pertemuan tahun ini mengangkat tema *Regulatory Collaboration for Harnessing Assured Medical Product Access*. Beberapa poin penting yang dibahas pada pertemuan ini adalah pentingnya kolaborasi antar otoritas regulator obat dalam melakukan pengawalan mutu obat, pengembangan dan penegakan standar, serta pengawasan obat dan produk medis lainnya.

Kepala Badan POM, Penny K. Lukito, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sesuai dengan tema yang diangkat tahun ini, kerja sama dan kolaborasi antara otoritas regulator obat negara anggota SEARN dapat menjawab tantangan dalam hal pengawasan obat, terutama terkait akses terhadap obat-obat yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Upaya kolektif SEARN dalam memperkuat sistem regulasi dan mempromosikan lanskap regulasi yang harmonis di kawasan ini akan membuka jalan bagi kelancaran pergerakan produk obat lintas batas.



Secara khusus pada pertemuan ini, Indonesia akan memaparkan tentang *regulatory oversight on vaccine*. BPOM sebagai otoritas regulator obat Indonesia telah memperoleh pengakuan dalam WHO *benchmarking tool* dengan tingkat kematangan/maturitas (*maturity level*) 3 dari 4 untuk semua fungsi dan mendapat nilai 4 untuk fungsi izin edar (*marketing authorization*), *vigilance*, akses laboratorium, dan fungsi *lot release*. Terkait vaksin, tingkat kematangan BPOM sebagai otoritas regulator obat ini memungkinkan vaksin yang diproduksi Indonesia dapat berkontribusi pada pasokan vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu untuk pasar global.





BAB XI

Sumber Daya Manusia

1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada triwulan III ini telah dilaksanakan pengumuman lokasi penempatan PPPK BPOM yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan PPPK Tahun Anggaran 2022. PPPK BPOM akan ditempatkan pada unit kerja di Lingkungan Badan POM sebagaimana tercantum dalam Surat Pengumuman KP.03.01.2.24.08.23.44 tentang Penempatan PPPK di Lingkungan Badan POM TA 2022. Bagi peserta yang lulus dan bersedia ditempatkan pada unit kerja akan diproses untuk usul penetapan nomor induk PPPK ke BKN. Jumlah PPPK yang lulus seleksi tahap ini dan akan ditempatkan sebanyak 284 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang diterima pada optimalisasi pasca sanggah pengisian kebutuhan JF teknis PPPK Badan POM TA 2022 adalah sebanyak 81 orang.

Selain itu pada triwulan ini, Badan POM berhasil meraih empat penghargaan pengelolaan manajemen ASN terbaik dalam ajang BKN Award 2023. Pertama yaitu Peringkat II Kategori Utama Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik. Kedua, Peringkat II Kategori Pengembangan Kompetensi Non Kementerian Tipe Besar. Ketiga, Peringkat III Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja Non Kementerian Tipe Besar. Keempat, Peringkat I Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT Non Kementerian Tipe Besar. Penghargaan diserahkan Kepala BKN, Bima Haria Wibisana secara daring. Penghargaan diberikan kepada Instansi pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkupnya masing-masing, termasuk pemanfaatan layanan digital ASN.

2. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Aplikasi *Integrated Development and Training Information System* (IDEAS) merupakan *platform* pengembangan kompetensi digital terintegrasi di Badan POM. Aplikasi tersebut memiliki fitur *online shopping training* atau pelatihan tidak terjadwal yaitu fitur yang memfasilitasi pegawai untuk mengikuti pembelajaran secara *online* kapanpun dan di manapun dengan memanfaatkan modul materi di aplikasi IDEAS. Fitur lain yang dimiliki aplikasi IDEAS adalah webinar/diskusi *online* yang dapat diikuti oleh pegawai Badan POM dengan narasumber yang berasal dari internal Badan POM maupun eksternal. Keunggulan lain dari IDEAS berupa penerbitan sertifikat *online* di mana semua data pengembangan kompetensi pada IDEAS terintegrasi dengan <https://siasn.pom.go.id>. Badan POM juga memiliki aplikasi SIMPHONI yang merupakan *platform knowledge management*. Aplikasi SIMPHONI memungkinkan pegawai atau Unit BPOM untuk *sharing* data, informasi, dan pengetahuan ke pegawai atau unit kerja lain. Pada triwulan III 2023, sebanyak 264 data/informasi/pengetahuan telah *publish* dan dikelola dalam aplikasi SIMPHONI.



Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2023 | BAB XII

BAB XII

Realisasi Anggaran Sampai dengan Triwulan III 2023

Total anggaran Badan POM Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.137.440.232.000,- untuk seluruh kegiatan di pusat maupun daerah. Anggaran yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Anggaran tersebut tersebar untuk 30 Satker Pusat, 34 Balai Besar/Balai POM dan 39 Loka POM. Realisasi anggaran Triwulan III tahun 2023 sebesar, Rp1.514.537.537.677,- (70,86%) yang terdiri dari realisasi anggaran untuk Satker Pusat Rp589.666.374.534,-,realisasi anggaran untuk seluruh Balai Besar/Balai POM Rp809.736.855.308,- ,dan realisasi anggaran untuk Loka POM sebesar Rp115.134.307.835,-.



Gambar 24. Realisasi Anggaran s.d Triwulan III 2023

Unit Kerja	Pagu	Realisasi	%
Pusat	824.172.493.000	589.666.374.534	71,55%
Balai Besar/ Balai POM	1.133.934.666.000	809.736.855.308	71,41%
Loka POM	179.333.073.000	115.134.307.835	64,20%
Total	2.137.440.232.000	1.514.537.537.677	70,86%

	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
Pagu	653.768.253.000	1.243.644.332.000	240.027.647.000	2.137.440.232.000
Realisasi	520.483.735.790	835.337.544.024	158.716.257.863	1.514.537.537.677
%	79,61%	67,17%	66,12%	70,86%



Kinerja BPOM Dalam Angka Triwulan III Tahun 2023 | BAB XIII

BAB XIII

Pemantauan Capaian Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BPOM

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, BPOM secara rutin telah melakukan pemantauan pelaksanaan RKP BPOM Tahun 2023. Pemantauan dilakukan terhadap perkembangan realisasi anggaran serta realisasi pencapaian sasaran kegiatan dan pencapaian sasaran program dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, juga kendala yang dihadapi untuk dapat segera diidentifikasi upaya tindak lanjut yang dibutuhkan. Pemantauan capaian RKP dilakukan per triwulan. Hasil pemantauan capaian RKP sampai dengan Triwulan III tahun 2023 sebagaimana terlampir pada buku ini.



PENUTUP

Kinerja yang ditampilkan dalam laporan ini hanya sebagian dari kinerja keseluruhan BPOM. Namun demikian para pihak terkait diharapkan mendapat gambaran jelas bahwa program dan kegiatan BPOM berorientasi pada pencapaian tujuan utama pembangunan pengawasan obat dan makanan 2021-2024 yaitu meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut BPOM akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya pada masa mendatang, dengan mengutamakan niat baik, komitmen, keterbukaan, perencanaan yang komprehensif (termasuk anggaran), pelaksanaan aksi, evaluasi dan analisis hasil, serta continuous Improvement.

LAMPIRAN I



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengawasan Obat	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UMKM OT yang menerima sertifikat CPOTB Bertahap	93.3	%	45.75	49.04%
		Indeks Pengawasan Makanan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	275	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	73	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
1.1	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93.5	%	91.72	98.10%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	84.2	%	89.23	105.97%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	89.5	%	90.85	101.51%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	79	%	88.99	112.65%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	%	88.47	98.30%
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	91	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	90.35	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	93	%	95.28	102.45%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	70	%	63.85	91.21%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	94	%	94.49	100.52%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	65	%	66.92	102.95%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	68	%	74.65	109.78%
		Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.39	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	79	%	76.55	96.90%
		Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	95	Nilai	94.95	99.95%
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	2,700	Sekolah	(progress)	75,78%
		Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	874	Desa	(progress)	76,84%
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	350	Pasar	(progress)	85,91%
		Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	82.35	82.35%
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	%	82.82	82.82%
		Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	77	%	48.80	63.38%
		Indeks RB UPT	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP UPT	83	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN UPT	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium/GLP	86	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.5	Indeks	2.91	116.40%
		Nilai Kinerja Anggaran UPT	94.5	Nilai	79.12	83.72%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.2	Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti	88	%	61.9	70.34%
		Persentase analisis kejahatan Obat dan Makanan yang berkualitas	85	%	100	117.65%
		Persentase data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang akurat	90	%	90.59	100.66%
		Persentase penggalangan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan yang mendapat respon positif	94	%	100	106.38%
		Indeks RB Direktorat Cegah Tangkal	86.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalisme ASN Direktorat Cegah Tangkal	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Cegah Tangkal yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	91	Nilai	92	101.10%
1.3	Intelijen Obat dan Makanan	Persentase rekomendasi intelijen obat dan makanan yang berkualitas	83	%	88.89	107.10%
		Persentase laporan informasi yang sesuai standar	83	%	83.69	100.83%
		Persentase laporan intelijen yang sesuai standar	83	%	90.91	109.53%
		Persentase Laporan informasi dan Laporan Intelijen UPT yang sesuai Pedoman	70	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah profil jaringan kejahatan Obat dan Makanan yang terpetakan	3	Jaringan	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	81.8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Intelijen Obat dan Makanan yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	91	%	75	82.42%
1.4	Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	Persentase sarana Produksi OT yang memenuhi persyaratan CPOTB	86	%	86.19	100.22%
		Persentase iklan OT dan SK yang memenuhi ketentuan	77	%	77.03	100.04%
		Persentase pemenuhan pedoman pengawasan OT dan SK oleh UPT	86	%	100	116.28%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	83	%	90.4	108.92%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	78	%	80.74	103.51%
		Persentase laporan keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang ditindaklanjuti tepat waktu	95	%	100	105.26%
		Persentase UPT yang dilakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	63	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	91.09	100.10%
		Indeks pelayanan publik di bidang pengawasan OT dan SK	4.55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Unit Kerja Direktorat Pengawasan OT dan SK yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99	%	100	101.01%
1.5	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	76	%	70.47	92.72%
		Persentase Peningkatan Industri pangan olahan yang telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	16	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan produksi	65	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase pemenuhan pelaksanaan pengawasan produksi pangan olahan oleh UPT BPOM sesuai dengan NSPK	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase keputusan hasil pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	92	%	97.98	106.50%
		Persentase koordinasi Pengawasan Produksi Pangan fortifikasi yang dilaksanakan	85	%	70	82.35%
		Persentase tingkat pengetahuan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Pengawasan Produksi yang diberikan	87	%	93.21	107.14%
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan Pengawasan Produksi Pangan Olahan sesuai standar	254	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan penilaian sarana Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	92.66	101.82%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	85.25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	92	%	75	81.52%
1.6	Pengawasan Kosmetik	Persentase sarana Kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	79.85	90.74%
		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	88	%	79.12	89.91%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase pemenuhan Ketentuan pengawasan Kosmetik oleh Balai Besar/Balai POM/Loka POM	86	%	100	116.28%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di bidang pengawasan kosmetik	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	88	%	91.19	103.63%
		Persentase hasil pengawasan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	84	%	85.73	102.06%
		Persentase laporan keamanan Kosmetik yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	%	95.56	105.01%
		Persentase UPT yang di lakukan supervisi dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan kosmetik	83	%	85.71	103.27%
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	93	%	93.23	100.25%
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik	4.55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pengawasan kosmetik	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan kosmetik	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan kosmetik yang optimal	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan kosmetik	100	%	90	90.00%
1.7	Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks kepuasan stakeholder terhadap pelayanan publik distribusi obat	91	Indeks	92.94	102.13%
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	87	%	93	106.90%
		Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	87	%	100	114.94%
		Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dana pelayanan obat oleh Balai	81	%	79.41	98.04%
		Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	94	%	94.58	100.62%
		Indeks pelayanan publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase stakeholder yang mendapat regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	80	%	78.5	98.13%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	94	Indeks	92.33	98.22%
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	82	Indeks	86.53	105.52%
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	88	%	100	113.64%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.8	Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang pengawasan iklan obat dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika dan prekursor	89	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan pelaku usaha dalam mutu dan keamanan obat dan NPP	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase permohonan persetujuan iklan obat yang diselesaikan tepat waktu	76	%	76.95	101.25%
		Jumlah permohonan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor yang diselesaikan tepat waktu	18100	Dokumen	16601	91.72%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.25	Indeks	4.64	109.18%
		Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	94.44	%	93.8	99.32%
		Persentase laporan Farmakovigilans yang ditindaklanjuti	70	%	77.69	110.99%
		Persentase laporan pengawasan mutu, label, iklan obat, dan NPP yang ditindaklanjuti	87	%	70.02	80.48%
		Jumlah label dan iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan	60400	Label dan Iklan	48174	79.76%
		Indeks RB Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Eksport Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas KMEIONAPPZA	98	%	100	102.04%
1.9	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	84	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	71	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah sarana peredaran yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) Peredaran	850	sarana	1524	179.29%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86	indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah kab/kota yang melaksanakan pengawasan post market sesuai standar	254	Kab/Kota	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang dilakukan sesuai standar	95	%	91.34	96.15%
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	84	%	87.37	104.01%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4.61	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Jumlah permohonan ekspor/impor yang diselesaikan tepat waktu	63,322	Permohonan	49,069	77.49%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.10	Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	Indeks RB Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang baik	94	%	88	93.62%
		Percentase Sarana produksi Obat yang mandiri dalam Pemenuhan CPOB	65	%	80.95	124.54%
		Percentase fasilitas produksi produk JKN, produk highrisk lainnya, serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar	91	%	76.42	83.98%
		Percentase tindak lanjut yang berkualitas dari hasil pengawasan sarana produksi di Balai	100	%	66.67	66.67%
		Percentase hasil pengawasan sarana produksi yang ditindaklanjuti	78	%	74.42	95.41%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik di bidang pengawasan sarana produksi obat	89	%	90.45	101.63%
		Percentase sarana produksi obat JKN, Bahan Baku Obat, dan obat highrisk lainnya yang mematuhi persyaratan CPOB	78	%	48.57	62.27%
		Percentase Keputusan penilaian fasilitas produksi Bahan Baku Obat, Obat, Produk Biologi dan Sarana Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	80	%	86.84	108.55%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Pelayanan Publik di Lingkup Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase tahapan pemenuhan fasilitas produksi obat baru yang diterbitkan keputusan dalam rangka pengawasan	75	%	50	66.67%
		Nilai RB Ditwas Produksi ONPP	88.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Ditwas Produksi ONPP	88	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan NPP yang optimal	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Ditwas Produksi ONPP	95	%	95	100.00%
1.11	Registrasi Pangan Olahan	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	91	%	78.3	86.04%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase hasil penilaian Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan tepat waktu	95	%	93.64	98.57%
		Persentase pengaduan terkait Registrasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti	100	%	100	100.00%
		Indeks pelayanan publik di Direktorat Registrasi Pangan Olahan	4.55	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	Indeks	70.56	77.54%
		Persentase pendampingan di bidang Registrasi pangan olahan yang efektif	95	%	98.95	104.16%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98.7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Pangan Olahan	81	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat Efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Pangan Olahan	99	%	95	95.96%
1.12	Registrasi Obat	Persentase obat yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	89.5	%	85.03	95.01%
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi Obat	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keputusan registrasi obat yang diselesaikan sesuai standar	77	%	71.14	92.39%
		Persentase hasil penilaian registrasi obat yang diselesaikan tepat waktu	79	%	80.39	101.76%
		Persentase pengaduan/keluhan/masukan terkait registrasi obat yang ditindaklanjuti	100	%	100	100.00%
		Indeks Pelayanan Publik di Direktorat Registrasi Obat	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sarana UK/Lab BE yang diinspeksi dan memenuhi CUKB	87	%	92.86	106.74%
		Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat	100	%	100	100.00%
		Indeks RB Direktorat Registrasi Obat	90.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi Obat	89.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi Obat yang optimal	2.5	Indeks	1.5	60.00%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Registrasi Obat	95	%	100	105.26%
1.13	Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	94	%	87.88	93.49%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP	85	Indeks	89.02	104.73%
		Persentase hasil penilaian registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/klinik dan DIP yang diselesaikan tepat waktu	83	%	89.47	107.80%
		Persentase pengaduan terkait registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik dan DIP yang ditindaklanjuti	75	%	94.91	126.55%
		Indeks pelayanan publik di Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Notifikasi Kosmetik dan Penilaian Uji Praklinik/ Klinik	4.55	Indeks	4.78	105.05%
		Persentase keputusan registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Notifikasi Kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	83	%	83.59	100.71%
		Persentase pendampingan di bidang registrasi OT, SK, Notifikasi Kosmetik, Penilaian Uji Praklinik/Klinik dan DIP yang efektif	78	%	89.3	114.49%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional	88	%	88.13	100.15%
		Indeks RB Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	89.7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	2.5	%	3	120.00%
		Tingkat Efektivitas penggunaan anggaran Direktorat Registrasi OT, SK dan Kosmetik	97	%	92	94.85%
1.14	Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	83.7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai tahapan penyusunan	93	%	81	8710%
		Persentase Sosialisasi standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang efektif kepada stakeholder	92.5	%	95.19	102.91%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	95.5	%	98.95	103.61%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.8	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	88.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	2.75	Indeks	3	109.09%
		Tingkat Efisisensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	%	100	100.00%
1.15	Standardisasi Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	77.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	94	%	70.91	75.44%
		Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	90	%	95	105.56%
		Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	92	%	77.78	84.54%
		Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	91	%	100	109.89%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks reformasi birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	100	%	92	92.00%
1.16	Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase sosialisasi standar ONPPZA kepada stakeholders yang efektif	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase standar ONAPPZA yang disusun dibanding dengan yang direncanakan	90	%	71.81	79.79%
		Indeks RB Direktorat Standardisasi ONPPZA	89.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi ONPPZA	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Standardisasi ONPPZA yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi ONPPZA	100	%	100	100.00%
1.17	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Persentase PKP/fasilitator yang melakukan pendampingan kepada UMK pangan olahan sesuai dengan pedoman	72	%	46.26	64.25%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha	89	Indeks	91.26	102.54%
		Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	34	%	progress 75%	



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	300	Kab/Kota	progress 70%	
		Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	95.5	%	progress 71,22%	
		Jumlah PKP/fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	227	UMK	160	70.48%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	4.55	Indeks	4.83	106.15%
		Jumlah pemda dan stakeholder yang diintervensi keamanan pangan	446	Pemda	234	52.47%
		Jumlah kader yang memahami prinsip keamanan pangan	740	Kader/ fasilitator	839	113.38%
		Tingkat efektivitas KIE makanan	95.12	%	95.93	100.85%
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pendampingan pelaku usaha dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan pangan sesuai pedoman	87	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	86.75	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Dit. PMPU	2.5	Indeks	2.75	110.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92	%	75	81.52%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
1.18	Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium/ Pengujian	86	%	84.6	98.37%
		Persentase pemenuhan grand design penguatan laboratorium pengujian Obat dan Makanan dan penguatan Balai POM	30	%	28	93.33%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di PPPOMN	92	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laboratorium Balai Besar/ Balai POM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan	91.2	%	89.74	98.40%
		Persentase Baku Pembanding yang ditetapkan sesuai kebutuhan	90.63	%	88.26	97.38%
		Persentase alat laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang dikalibrasi sesuai standar	100	%	87.75	87.75%
		Persentase sampel Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	99.52	105.87%
		Indeks Pelayanan Publik PPPOMN	4.55	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase jejaring laboratorium Obat dan Makanan yang diikuti secara aktif	86	%	78.57	91.36%
		Indeks RB PPPOMN	87.6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPPOMN	80.2	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN	86.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Status Akreditasi	86	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN	95.3	nilai	83.7	87.83%
1.19	Penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan	70	%	50.9	72.71%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	86	%	73.97	86.01%
		Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	85	%	75	88.24%
		Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	52	%	60	115.38%
		Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi Laporan Kejadian	65	%	54.55	83.92%
		Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani sesuai Standar	70	%	49.98	71.40%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	66.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	91	%	100	109.89%
1.20	Analisis Kebijakan di bidang Obat dan Makanan	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	80	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase kesesuaian penyelenggaraan analisis kebijakan dengan pedoman analisis kebijakan	96	%	84.55	88.07%
		Nilai kualitas diseminasi hasil analisis kebijakan	77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	88.7	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	79.6	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	86.9	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	92.5	nilai	59.15	63.95%
		Persentase analisis kebijakan yang sesuai dengan perencanaan	100	%	100	100.00%
		Indeks kepuasan internal terhadap layanan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	3.63	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis pimpinan	84	Nilai	87.08	103.67%
1.21	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	84	Indeks	93.19	110.94%
		Persentase lintas sektor yang bersinergi dalam rangka pendampingan UMKM OT Kos dan Pemberdayaan masyarakat di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik	84	%	75	89.29%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase kader/penyuluhan yang berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos	86	%	82.31	95.71%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat terhadap penerapan keamanan OT,SK dan Kos	84	%	100	119.05%
		Persentase lintas sektor yang berkomitmen dalam pendampingan UMKM OT dan Kos	84	%	83.33	99.20%
		Persentase fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT dan Kos yang sesuai standar	96	%	78.06	81.31%
		Tingkat efektivitas KIE OT, Kos dan SK	96.08	%	98.22	102.23%
		Indeks pelayanan publik di bidang pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha OT, Kos dan SK	4.25	Indeks	4.66	109.65%
		Jumlah kader/penyuluhan yang memiliki kemampuan lanjutan terhadap keamanan, manfaat, dan mutu OT, SK, dan Kos	294	komunitas	242	82.31%
		Indeks RB Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	82	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, Kos dan SK yang optimal	2.2	Indeks	2.5	113.64%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	99	%	73.34	74.08%
1.22	Pemantauan Pelanggaran Hukum di Bidang Peredaran Obat dan Makanan melalui Siber	Percentase Rekomendasi Analisis Siber di bidang Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	87.11	102.48%
		Percentase Hasil Patroli Siber yang ditindaklanjuti	80	%	80.5	100.63%
		Percentase Profil Pelanggaran/Kejahatan Siber Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	85	%	86.68	101.98%
		Percentase Hasil Analisis Digital Forensik yang dimanfaatkan	90	%	94.14	104.60%
		Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Siber Obat dan Makanan	78.4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Siber Obat dan Makanan	86.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Siber Obat dan Makanan yang Optimal	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Siber Obat dan Makanan	90	%	92	102.22%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
2	Program Dukungan Manajemen	Nilai RB BPOM di lingkup Sekretariat Utama	34.4	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Opini	WTP	100%
		Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama	74.22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.5	Nilai	88.46	93.61%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Opini Publik BPOM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kerja sama yang efektif	88	%	72.82	82.75%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akutabilitas Kinerja BPOM	8.77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
2.1	Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	99.01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94	%	91.68	97.53%
		Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)	2	Negara	1	50.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas	90	%	100	111.11%
		Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media	99.85	%	99.08	99.23%
		Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral	88	%	73.43	83.44%
		Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti	79	%	81.37	103.00%
		Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting	95.5	%	97.85	102.46%
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	%	72.2	82.05%
		Indeks kepuasan media	77	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks opini publik BPOM	85	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas	3.87	Indeks	3.89	100.52%
2.2	Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan	Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas	4.74	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM	74.22	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM	96	Nilai	82.34	85.77%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM	95.57	Nilai	97.65	102.18%
		Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP	100	%	75	75.00%
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan	3.84	Indeks	3.73	97.14%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman	81.39	%	70	86.01%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	86	86.00%
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar	100	%	55	55.00%
		Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan	90	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan	2.5	Indeks	2.75	110.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100	%	100	100.00%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
2.3	Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana	Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan	4.63	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi	7.43	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Penataan tata laksana	5.71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi	93	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi	3.8	Indeks	3.86	101.58%
		Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015	100	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun	100	%	80.83	80.83%
		Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti	100	%	100	100.00%
		Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang selesai ditindaklanjuti	99.6	%	99.42	99.82%
		Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan	96.26	%	96.39	100.14%
		Indeks Pelayanan Publik	4.6	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi	87.25	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi	84	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi	2.5	Indeks	2.75	110.00%
		Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi	95.7	%	95.7	100.00%
2.4	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM	6.04	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Sistem Merit	0.94	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM	3.47	Indeks	3.69	106.34%
		Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir	77	Indeks	52.54	68.23%
		Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik	93	%	99.73	107.24%
		Indeks Kesejahteraan Pegawai	3.07	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik	74	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan	82.5	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Biro SDM	84.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM	80	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM	2.5	Indeks	2.5	100.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM	100	%	95	95.00%
2.5	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM	Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi	81	%	80.3	99.14%
		Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar	851	SDM	853	100.24%
		Nilai RB BPOM Manajemen Perubahan	4.71	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	62	%	37.5	60.48%
		Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	94	Kerja Sama	94.12	100.13%
		Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi	4.47	Nilai	4.64	103.80%
		Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi	93	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase layanan pembinaaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu	55	%	89.04	161.89%
		Nilai kepuasaan Layanan PFM	4.1	Nilai	4.46	108.78%
		Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	89	Nilai	60	67.42%
		Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM	87	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP PPSDM POM	83	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM	85	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal	2.5	Indeks	3.00	120.00%
2.6	Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM	94.5	Nilai	60.51	64.03%
		Tingkat efisiensi penggunaan Anggaran PPSDM POM	96	%	95	98.96%
		Indeks SPBE BPOM	3.3	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Kepuasan Layanan TIK	3.45	Indeks	3.32	96.23%
		Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu	96	%	97	101.04%
		Persentase Pemenuhan Bussines Continuity Management	39	%	37.5	96.15%



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time)	4	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan	90	%	80	88.89%
		Jumlah Data Berbagi Pakai	25	%	20	80.00%
		Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir	100	%	80	80.00%
		Persentase sistem informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time	85	Nilai	84.17	99.02%
		Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK	100	%	80.2	80.20%
		Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81.2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86.9	nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	79	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal	3	Indeks	3	100.00%
		Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastruktur, Data dan Keamanan	75	%	73.91	98.55%
		Sertifikasi ISO 27001	1	sertifikat	1	100.00%
		Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	94.8	Nilai	52.54	55.42%
2.7	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat I	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintah Inspektorat I	99.01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94	%	91.68	97.53%
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat I	85.9	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87.5	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat I yang sesuai standar mutu	100	%	100	100.00%
		Persentase rekomendasi pengawasan intern Inspektorat I yang ditindaklanjuti	95	%	94.79	99.78%
		Persentase Pengaduan Mitra Kerja Inspektorat I yang Ditindaklanjuti sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	100	%	61.54	61.54%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	92	97.87%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil monev rencana aksi pelaksanaan RB BPOM yang ditindaklanjuti	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi survei kepuasan masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
2.8	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Indeks RB Inspektorat I	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat I	87.2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat I	91	Indeks	75	82.42%
		Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.77	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi mitra kerja Inspektorat II	4	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap standar akuntansi pemerintahan	99.01	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94	%	97.91	104.16%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100	%	62.5	62.50%
		Persentase permintaan layanan konsultansi mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	94	%	100	106.38%
		Persentase rekomendasi hasil reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	79	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase Rekomendasi Hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	82	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	90	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks RB Inspektorat II	86.1	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Level Kapabilitas APIP	4	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks profesionalitas ASN Inspektorat II	86.25	%	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat II	91	%	86	94.51%
2.9	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	92	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Pengelolaan Aset BPOM	2.95	Nilai	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM	74	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum	3.78	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun



No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target	Satuan	Realisasi	%Capaian
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan	100	Persen	85	85.00%
		Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan	89	Persen	100	112.36%
		Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik	85	Persen	97.59	114.81%
		Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker	87	Level	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan	88	Persen	90.31	102.63%
		Indeks RB Biro Umum	84.2	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks Profesionalitas ASN Biro Umum	76	Indeks	Akhir Tahun	Akhir Tahun
		Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal	2.5	Indeks	3	120.00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum	91	%	95	104.40%

LAMPIRAN II



A. UNIT PUSAT

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan	346.593.234.000	259.978.817.743	75,01%
1.1	Biro Kerjasama	15.698.337.000	9.782.935.596	62,32%
1.2	Biro Perencanaan dan Keuangan	20.997.974.000	15.001.702.910	71,44%
1.3	Biro Hukum dan Organisasi	13.608.599.000	10.016.215.723	73,60%
1.4	Biro Umum	123.266.485.000	85.716.351.267	69,54%
1.5	Biro Sumber Daya Manusia	173.021.839.000	139.461.612.247	80,60%
2	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	59.753.737.000	42.518.711.637	71,16%
2.1	Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	9.762.277.000	6.721.107.624	68,85%
2.2	Dit. Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif	13.612.718.000	9.652.617.185	70,91%
2.3	Dit. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor	12.464.912.000	9.044.810.914	72,56%
2.4	Dit. Registrasi Obat	12.501.315.000	8.710.461.728	69,68%
2.5	Dit. Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	11.412.515.000	8.389.714.186	73,51%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
3	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	54.877.335.000	40.768.870.795	74,29%
3.1	Dit. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	12.417.422.000	8.910.229.240	71,76%
3.2	Dit. Pengawasan Kosmetik	10.540.301.000	7.786.670.369	73,88%
3.3	Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	11.904.081.000	8.270.066.497	69,47%
3.4	Dit. Standadisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7.215.901.000	6.428.143.990	89,08%
3.5	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	12.799.630.000	9.373.760.699	73,23%
4	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	68.535.272.000	46.437.845.041	67,76%
4.1	Dit. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	18.223.845.000	11.984.671.167	65,76%
4.2	Dit. Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	15.185.625.000	9.176.484.594	60,43%
4.3	Dit. Registrasi Pangan Olahan	9.611.993.000	7.627.567.020	79,35%
4.4	Dit. Standrdisasi Pangan Olahan	9.123.257.000	6.407.608.874	70,23%
4.5	Dit. Pengawasan Produksi Pangan Olahan	16.390.552.000	11.241.513.386	68,59%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
5	Deputi Bidang Penindakan	55.716.456.000	39.627.991.479	71,12%
5.1	Dit. Siber Obat dan Makanan	11.672.409.000	8.540.010.413	73,16%
5.2	Dit. Intelijen Obat dan Makanan	7.945.762.000	5.784.496.650	72,80%
5.3	Dit. Penyidikan Obat dan Makanan	8.089.254.000	5.928.034.003	73,28%
5.4	Dit. Cegah Tangkal	28.009.031.000	19.375.450.413	69,18%
6	Inspektorat Utama	28.172.750.000	20.638.340.950	73,26%
6.1	Inspektorat I	21.523.929.000	16.061.077.177	74,62%
6.2	Inspektorat II	6.648.821.000	4.577.263.773	68,84%
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional	78.727.651.000	55.882.199.992	70,98%
8	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	23.729.178.000	15.335.068.535	64,63%
9	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	59.791.424.000	34.595.073.269	57,86%
10	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	48.275.456.000	33.883.455.093	70,19%
	TOTAL SATKER PUSAT	824.172.493.000	589.666.374.534	71,55%

B. BALAI BESAR / BALAI POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Ambon	27.553.095.000	21.900.844.732	79,49%
2	Kendari	28.121.644.000	22.156.890.910	78,79%
3	Mamuju	20.078.885.000	15.638.109.862	77,88%
4	Pangkal Pinang	15.720.120.000	12.182.561.004	77,50%
5	Tarakan	14.739.918.000	11.403.243.148	77,36%
6	Denpasar	41.885.018.000	32.168.612.821	76,80%
7	Jambi	33.290.140.000	25.559.987.189	76,78%
8	Palu	23.238.746.000	17.796.930.792	76,58%
9	Medan	45.414.206.000	34.689.237.454	76,38%
10	Batam	21.360.435.000	16.187.273.866	75,78%
11	Samarinda	27.842.292.000	20.887.150.178	75,02%
12	Banjarmasin	31.091.503.000	23.127.653.815	74,39%
13	Palangkaraya	20.459.287.000	15.203.203.210	74,31%
14	Pekan Baru	33.825.043.000	24.841.163.594	73,44%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
15	Pontianak	26.511.613.000	19.396.791.105	73,16%
16	Bengkulu	27.265.787.000	19.857.254.575	72,83%
17	Manokwari	20.228.400.000	14.653.174.655	72,44%
18	Mataram	22.807.156.000	16.508.046.234	72,38%
19	Kupang	29.272.698.000	21.140.889.841	72,22%
20	Gorontalo	17.805.831.000	12.752.950.496	71,62%
21	Palembang	29.736.969.000	21.222.360.974	71,37%
22	Makassar	55.019.411.000	38.988.647.213	70,86%
23	Banda Aceh	27.649.490.000	19.499.409.631	70,52%
24	Bandung	72.498.161.000	51.005.848.582	70,35%
25	Serang	27.685.447.000	19.345.645.848	69,88%
26	Yogyakarta	43.382.077.000	30.297.737.784	69,84%
27	Jakarta	48.541.527.000	33.889.150.689	69,81%
28	Bandar Lampung	30.736.521.000	21.416.541.544	69,68%
29	Surabaya	59.077.061.000	41.091.057.988	69,56%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
30	Jayapura	26.393.656.000	18.354.224.840	69,54%
31	Semarang	59.565.524.000	39.230.486.964	65,86%
32	Manado	46.555.875.000	30.524.757.424	65,57%
33	Padang	56.663.363.000	37.091.174.392	65,46%
34	Sofifi	21.917.767.000	9.727.841.954	44,38%
TOTAL SATKER BALAI		1.133.934.666.000	809.736.855.308	71,41%



C. LOKA POM

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
1	Kabupaten Pulau Morotai	2.996.100.000	2.375.529.762	79,29%
2	Kabupaten Kotawaringin Barat	3.860.074.000	3.054.520.908	79,13%
3	Kabupaten Kediri	4.267.473.000	3.353.828.913	78,59%
4	Kabupaten Tangerang	4.510.246.000	3.543.611.784	78,57%
5	Kabupaten Tulangbawang	3.438.813.000	2.635.737.377	76,65%
6	Kota Sungai Penuh	3.314.756.000	2.530.421.745	76,34%
7	Kabupaten Jember	3.732.450.000	2.802.844.569	75,09%
8	Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.393.408.000	2.541.533.091	74,90%
9	Kabupaten Aceh Selatan	3.682.195.000	2.752.838.299	74,76%
10	Kota Lubuklinggau	3.627.329.000	2.700.371.513	74,45%
11	Kabupaten Bogor	5.233.355.000	3.860.450.614	73,77%
12	Kabupaten Bima	3.802.795.000	2.801.154.901	73,66%
13	Kabupaten Belitung	3.226.557.000	2.369.088.212	73,42%
14	Kota Baubau	4.452.200.000	3.265.195.138	73,34%

NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
15	Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.690.207.000	2.691.181.546	72,93%
16	Kabupaten Sanggau	3.361.132.000	2.446.649.755	72,79%
17	Kabupaten Banyumas	5.306.820.000	3.848.433.856	72,52%
18	Kota Surakarta	4.967.106.000	3.591.652.439	72,31%
19	Kabupaten Buleleng	4.448.763.000	3.215.613.572	72,28%
20	Kota Dumai	4.268.061.000	3.070.271.551	71,94%
21	Kota Tanjungbalai	2.878.065.000	2.067.832.690	71,85%
22	Kota Balikpapan	3.641.618.000	2.615.755.019	71,83%
23	Kabupaten Indragiri Hilir	4.145.592.000	2.946.833.227	71,08%
24	Kabupaten Toba Samosir	2.941.402.000	2.077.827.159	70,64%
25	Kabupaten Banggai	3.274.986.000	2.309.378.660	70,52%
26	Kabupaten Mimika	4.099.732.000	2.887.966.868	70,44%
27	Kota Palopo	4.611.389.000	3.243.536.357	70,34%
28	Kabupaten Ende	4.821.592.000	3.359.399.595	69,67%
29	Kota Tasikmalaya	5.043.673.000	3.510.817.252	69,61%



NO	UNIT KERJA	TOTAL PAGU		
		PAGU	REALISASI	%
30	Kabupaten Dharmasraya	3.199.212.000	2.168.873.929	67,79%
31	Kabupaten Merauke	3.353.285.000	2.178.920.449	64,98%
32	Kabupaten Tanah Bumbu	4.149.061.000	2.674.660.096	64,46%
33	Kota Tanjungpinang	3.591.445.000	2.236.753.371	62,28%
34	Kabupaten Sorong	4.837.313.000	3.001.192.210	62,04%
35	Kabupaten Manggarai Barat	3.999.146.000	2.430.503.934	60,78%
36	Kota Payakumbuh	5.379.406.000	3.184.618.829	59,20%
37	Kabupaten Aceh Tengah	11.142.467.000	4.041.555.436	36,27%
38	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	11.566.899.000	4.150.367.472	35,88%
39	Kabupaten Rejang Lebong	13.076.950.000	4.596.585.737	35,15%
TOTAL SATKER LOKA		179.333.073.000	115.134.307.835	64,20%
TOTAL SELURUH SATKER		2.137.440.232.000	1.514.537.537.677	70,86%





• • • •

KINERJA BPOM DALAM ANGKA TRIWULAN III TAHUN 2023

• • • •



Jln. Percetakan Negara Jakarta Pusat
10560



021 4244691



www.pom.go.id



halobpom@pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI